

**EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS
RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Program Studi Ekonomi Pembangunan



Oleh :

Nama : Nurmauliza
NPM : 1505180054
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 - 2019**

 MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NURMAULIZA
NPM : 1505180054
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS
RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

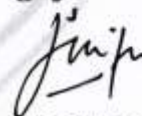
Tim Penguji

Penguji I



(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)

Penguji II



(Dra. Hj. LAILAN SAFINA, M.Si)

Pembimbing



(Dra. ROSWITA HAFNI, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

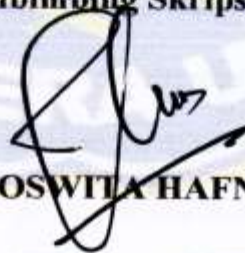
Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NURMAULIZA
N.P.M : 1505180054
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS
RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN
LANGKAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si

*Lembaran Ini Kupersembahkan Khusus Untuk Kedua
Orang Tuaku (Ayah dan Ibu Jercinta)*

Untuk Kalian Berdua (Ayah dan Ibu Tersayang)

Cinta seorang ibu itu menenangkan

Cinta seorang ayah itu menguatkan

Aura Cinta Seorang Ibu Dapat Menghadirkanku Kedamaian

Aura Cinta Seorang Ayah Akan Memberiku Kekuatan

Tak Perlu Pergi ke Ujung Dunia

Untuk Belajar tentang Cinta dan Keikhlasan

Karena Pelajaran Itu Dapat Ku Lihat

Dari Sosok Seorang Ibu

Ayah, yang tak banyak bicara terkesan tidak peduli

Tetapi sesungguhnya yang ada dalam hatinya hanyalah kita

Ayah rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya

Hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya

Ayah Bunda itu layaknya pelita sebagai penerang hidup.

Ibarat cahaya lilin selalu setia menerangi setiap sudut jalan.

Dan sebagai semangat yang menjadi motivasi

Tuk tetap kuat untuk terus melangkah maju

Kebaikan seorang ayah lebih tinggi dari gunung,

Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari lautan

Orang tua menunda merasakan nikmat hari ini

Untuk melihat anaknya melihat nikmat dimasa depan

“Ayah Ibu Terima Kasih, Aku Mencintai Dan Menyanyangi Kalian Berdua”

ABSTRAK

NURMAULIZA (1505180054), Efektivitas Program Pelaksanaan Bansos Rastra Terhadap Ketahanan Pangan Di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. (Skripsi 2019)

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Program Bansos Rastra merupakan bagian dari sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama sehingga menjadikan beras sebagai komoditas nasional yang sangat strategis, tujuan dan sasaran program ini adalah mengurangi beban pengeluaran dan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar pangan masyarakat miskin. Kecamatan Tanjung Pura dengan jumlah penduduk 68.464 jiwa dan jumlah penduduk Kabupaten Langkat mencapai 1.028.309 jiwa pada tahun 2017 dan 6.863 keluarga penerima manfaat Bansos Rastra.

Analisis ini menggunakan Deskriptif data Kualitatif dengan jenis data menggunakan survey. Maka diambil sampel sebanyak 44 peserta penerima Bansos Rastra. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling insidental. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjung pura bahwa program Bansos Rastra yang ditujukan bagi masyarakat miskin sudah efektif dalam membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

Kata kunci : Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), Ketahanan Pangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tidak lupa Shalawat berangkaikan salam kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezekinya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izinnya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai khususnya untuk Ayah saya Syamsul Bahri dan Ibu saya Habibah, sebagai sumber penyemangat

dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk Kakak saya Murni Yati Syafitri, S.Pd serta Adik-adik saya Muhammad Syukri dan Muhammad Syafrizal yang selalu memberikan dukungan, semangat maupun materi kepada penulis.

4. Untuk ibuk saya Elfi Nora, S.Pd.I dan Suaminya terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai detik ini baik itu semangat maupun materi.

5. Kepada yang bisa dikatakan sebagai teman, sahabat, abang, adik sekaligus orang yang selalu mendukung saya, Muhammad Irfan terima kasih telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa serta duka.

6. Kepada Sahabat-sahabat saya, Nurshabrina siddik, Riska Rahmadiyah Munthe, Kemala Sari dan Novia Lestari terima kasih telah banyak membantu dan memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa menemani penulis selama ini dalam canda tawa serta duka yang telah banyak kita lewati bersama.

7. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu Dra. Roswita Hafni, SE. M.Si., Selaku Sekertaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan diakhirat kelak.
12. Seluruh staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik.
13. Keluarga Saya (Seluruh Anggota Keluarga), terima kasih sudah sering membantu penulis dalam segala hal.
14. Kepada teman-teman seperjuangan saya, dan seluruh teman – teman dari Ekonomi Pembangunan stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis dalam mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, September 2019

Penulis

NURMAULIZA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	10
1.6. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	12
A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik.....	16
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik.....	24
C. Keynes.....	27
2.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	29
2.1.3 Faktor Pertumbuhan Ekonomi.....	32
2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	32

2.1.5 Tinjauan Kebijakan Pemerintah.....	41
2.2.1 Tinjauan Kemiskinan.....	42
A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	47
B. Penyebab – penyebab Kemiskinan.....	49
C. Indikator Kemiskinan.....	51
2.3.1 Tinjauan Efektivitas.....	54
A. Pendekatan Efektivitas.....	57
2.4.1 Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra).....	58
2.4.2 Tujuan Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra).....	59
2.4.3 Manfaat Beras Sejahtera (Rastra).....	59
2.4.4 Penyaluran Bansos Rastra ke Titik Distribusi (TD).....	60
2.4.5 Penyaluran Bansos Rastra ke TB hingga ke KPM.....	61
2.5.1 Ketahanan Pangan.....	62
2.2 Penelitian Terdahulu.....	62
2.3 Kerangka Konseptual.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
3.1 Pendekatan Penelitian.....	67
3.2 Definisi Operasional.....	68
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	69
3.4 Populasi dan Sampel.....	70
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	72
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	73
3.7 Teknik Analisis Data.....	74

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Letak Geografi Kabupaten Langkat.....	75
4.2 Penduduk Kabupaten Langkat	77
4.3 Pembangunan Manusia	79
4.4 Sejarah Singkat Kecamatan Tanjung Pura	79
4.4.1 Letak dan Geografis Tanjung Pura	83
4.4.2 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017	84
4.5 Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)	85
4.6 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	87
4.6.1 Karakteristik Penerima Bansos Rastra	87
4.6.2 Deskripsi Kuesioner	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	3
Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Kabupaten Langkat	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	62
Tabel 3.1 Definisi Operasional	68
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	70
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	76
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 4.3 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017.....	84
Tabel 4.4 Jumlah Penerima Bansos Rastra di Kabupaten Langkat.....	86

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	66
Gambar 4.1 Penerima Bansos Berdasarkan Jenis Kelamin	87
Gambar 4.2 Penerima Bansos Berdasarkan Usia	88
Gambar 4.3 Penerima Bansos Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
Gambar 4.4 Penerima Bansos Berdasarkan Pekerjaan Suami	90
Gambar 4.5 Distribusi Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	92
Gambar 4.6 Distribusi Berdasarkan Jumlah Anak Responden	93
Gambar 4.7 Distribusi Berdasarkan Penghasilan/Bulan	94
Gambar 4.8 Distribusi Berdasarkan Persepsi Mengenai Program Bansos Rastra.....	95
Gambar 4.9 Distribusi Mengenai Informasi Tentang Program Bansos Rastra.....	96
Gambar 4.10 Distribusi Mengenai Manfaat Program Bansos Rastra	97
Gambar 4.11 Distribusi Mengenai Bantuan Lain Selain Rastra	99
Gambar 4.12 Distribusi Mengenai Berapa Lama Mendapatkan Bansos Rastra.....	100
Gambar 4.13 Distribusi Mengenai Jumlah Beras 10kg/bulan	101
Gambar 4.14 Distribusi Mengenai Bansos Rastra Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	102
Gambar 4.15 Distribusi Mengenai Tanggapan Tentang Pembagian Beras	

10kg/ bulan.....	103
Gambar 4.16 Distribusi Mengenai Penggati Beras dengan Sembako.....	104
Gambar 4.17 Distribusi Mengenai Titik Bagi Bansos Rastra	105
Gambar 4.18 Distribusi Mengenai Biaya Tambahan Dalam Pengambilan Beras.....	106
Gambar 4.19 Distribusi Mengenai Kendala Dalam Pengambilan Bansos Rastra.....	107
Gambar 4.20 Distribusi Mengenai Bansos Rastra Yang Dapat Mengurangi Beban Kebutuhan Pangan	108
Gambar 4.21 Distribusi Mengenai Kualitas Beras.....	109
Gambar 4.22 Distribusi Tanggapan Mengenai Bansos Rastra.....	110
Gambar 4.23 Distribusi Mengenai Tujuan Bansos Rastra	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna (Sifari, 2014 : 11). Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensial yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Adapun masalah kemiskinan umumnya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan adanya masalah kemiskinan, pembangunan dalam suatu negara akan terhambat sehingga tujuan dan cita-cita suatu negara tersebut tidak terlaksana dengan baik. Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017 menyatakan masalah kemiskinan paling besar terjadi di pedesaan. Semakin jauh dan terpencil lokasi sebuah desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan di wilayah desa atau pinggiran tidak mengalami peningkatan (Sumariyah, 2017).

Salah satu indikator kemiskinan menurut BPS yaitu adalah hanya mengkonsumsi daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu serta hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, dengan kata lain salah satu indikator kemiskinan menurut BPS adalah kekurangan pangan.

BPS tahun 2012 menetapkan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan nonpangan serta besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dengan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari. Komoditas pangan terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Seperti menurut Indonesian Nutritoin Network (INN) tahun 2009 adalah Rp. 96.956 untuk perkotaan dan Rp. 72.780 untuk pedesaan. Kemudian Menteri Sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskina yang diterapkannya adalah keluarga yang memiliki pengasilan di bawah Rp. 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang juga mengacu pada indikator BPS tahun 2005 menyatakan bahwa batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp. 180.000 perbulan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun, hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah penduduk miskin (juta orang)			Persentase penduduk miskin			Garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa
Maret 2013	10,33	17,74	28,07	8,39	14,32	11,37	289 042	253 273
September 2013	10,63	17,92	28,55	8,52	14,42	11,47	308 826	275 779
Maret 2014	10,51	17,77	28,28	8,34	14,17	11,25	318 514	286 097
September 2014	10,36	17,37	27,73	8,16	13,76	10,96	326 853	296 681
Maret 2015	10,65	17,94	28,59	8,29	14,21	11,22	342 541	317 881
September 2015	10,62	17,89	28,51	8,22	14,09	11,13	356 378	333 034
Maret 2016	10,34	17,67	28,01	7,79	14,11	10,86	364 527	343 647
September 2016	10,49	17,28	27,76	7,73	13,96	10,70	372 114	350 420
Maret 2017	10,67	17,10	27,77	7,72	13,93	10,64	385 621	361 496
September 2017	10,27	16,31	26,58	7,26	13,47	10,12	400 995	370 910

Sumber :bps Indonesia

Program Raskin kini berganti nama menjadi Rastra (beras sejahtera) pada Agustus tahun 2015. Bantuan Sosial Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program dan pembagian berasnya. Bansos Rastra adalah bantuan pangan dalam bentuk beras yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10Kg.

Program rastra merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan agar mereka mendapatkan beras untuk keperluan rumah tangganya dan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum BULOG Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah daerah dan masyarakat.

Sasaran dalam program Rastra ini adalah masyarakat yang pendapatan perkapitanya masih berada di bawah rata-rata sehingga kesulitan untuk menopang kehidupan sehari-hari, hal ini berarti tidak semua masyarakat di Indonesia berhak untuk mendapatkan bantuan beras melalui program Rastra ini, namun selama ini program Rastra banyak sorotan yang kurang baik oleh publik akibat pemberitaan yang berkembang mengenai kurang baiknya pengelolaan program ini baik secara teknis maupun non teknis.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang tepatnya sasaran program ini, salah satunya adalah data yang ada disuatu Kecamatan atau Kelurahan belum diperbaharui atau belum diverifikasi kembali sehingga tidak akurat dengan keadaan masyarakat tersebut sekarang, misalnya masyarakat yang sejahtera tetapi masih menerima bantuan melalui program Rastra, dan sebaliknya masyarakat yang benar-benar berada dalam kategori miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan Rastra. Beliau juga mengatakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial terkait dengan penyelenggaraan Bansos Rastra. Beliau juga

menambahkan bahwa ada warga yang berhak mendapatkan Bansos tersebut tetapi tidak terdaftar dalam keluarga penerima manfaat, dikarenakan keluarga penerima manfaat tersebut diputuskan langsung melalui Dinas Sosial. (Wawancara pra penulisan dengan Kepala Desa Teluk Bakung pada tanggal 19 Desember 2018).

Seperti yang dialami oleh seorang informan yang merupakan salah satu warga yang ada di Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura dengan jumlah Keluarga yang banyak, beliau merasa Rastra yang hanya 10 Kg per bulan belum bisa mencukupi kebutuhan pokoknya dalam satu bulan. (Wawancara pra penulisan dengan informan pada tanggal 06 Desember 2018).

Sesuai dengan undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang pangan, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, dan dilanjutkan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, disebutkan bahwa salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pangan merupakan kebutuhan pokok dan komoditi strategis dalam kehidupan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya secara sehat dan produktif. Namun, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhan pangannya karena beberapa alasan sehingga mengalami kelaparan dan menghadapi kondisi rawan pangan.

Upaya memenuhi kebutuhan pangan melibatkan banyak pelaku yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan masyarakat dan swasta

sebagai mitra pemerintah mencerminkan adanya proses pembangunan berkelanjutan.

Ketahanan pangan menurut UU No.7 tahun 1996 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ketahanan pangan mempersyaratkan terpenuhinya dua sisi secara simultan, yaitu ketersediaan dan konsumsi.

Jumlah Penduduk miskin provinsi Sumatera Utara berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2015 sebanyak 1.508.100 jiwa. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.455.900 jiwa. Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Utara juga menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat dari tahun 2014 sampai 2017 berubah-ubah hingga mengalami peningkatan pada tahun 2015.

Tabel 1.2

Angka Kemiskinan Kabupaten Langkat

c	Angka Kemiskinan			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	100.63	114.19	115.79	114.41
Persentase	9.99	11.30	11.36	11.15
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	294175	304825	348205	364517
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.22	1.70	1.78	1.67
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.26	0.42	0.41	0.39

Sumber :Bps Kabupaten Langkat

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera ditentukan dengan kondisi keluarga sebagai berikut :

1. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan keluarga berencana.
2. Keluarga sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yaitu :

1. Faktor internal, yang meliputi : (a) kesakitan (b) kebodohan (c) ketidaktahuan (d) ketidakterampilan (e) ketertinggalan teknologi dan (f) tidak memiliki modal.
2. Faktor eksternal, yang meliputi :
 - a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan.
 - b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga.

c. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.

Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan luas wilayahnya 17.961 Ha (179,61 Km²) dan jumlah penduduk sebanyak 68.464 jiwa. Berdasarkan data yang ada peneliti memilih Kecamatan Tanjung Pura sebagai lokasi penelitian dikarenakan Tanjung Pura sebagai penerima Rasta terbesar di antara Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Langkat.

Penyaluran beras buat warga miskin di Kabupaten Langkat Sumatera Utara diperuntukkan untuk 82.052 rumah tangga sasaran yang ada di 21 kecamatan, yaitu Bahorok 3.454 RTS, Sirapit 1.534 RTS, Salapian 2.076 RTS, Kutambaru 793 RTS, Sei Bingei 2.882 RTS, Kuala 2.280 RTS, Selesai 5.206 RTS, Binjai 2.066 RTS, Stabat 5.968 RTS, Wampu 2.861 RTS, Batang Serangan 1.979 RTS, Sawit Seberang 1.515 RTS, sedangkan kecamatan Secanggang 6.806 RTS, Tanjung Pura 6.863 RTS, Gebang 4.459 RTS, Babalan 5.892 RTS, Sei Lapan 1.169 RTS, Brandan Barat 2.762 RTS, Besitang 5.059 RTS, Pangkalan Susu 3.676 RTS, dan Pematang Jaya 1.443 RTS. Dari data di atas menjelaskan bahwa daerah yang terbesar menerima Rasta ini adalah kecamatan Tanjung Pura 6.863 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi apakah program Bansos Rasta di Kecamatan Tanjung Pura telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian mengenai “ **Efektivitas Program Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera**

(Bansos Rastra) terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini diperoleh dari uraian latar belakang masalah yaitu :

1. Jumlah anggota Keluarga yang banyak dapat mengancam ketahanan pangan.
2. Pendistribusian yang mengalami kendala dapat berdampak pada ketahanan pangan Rumah Tangga Miskin.
3. Bansos Rastra tidak menjamin keberlangsungan ketahanan pangan untuk Rumah Tangga Sasaran.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya identifikasi permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah, penelitian ini akan dijelaskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya program Bansos Rastra dalam meningkatkan ketahanan pangan Rumah Tangga Miskin.
2. Banyaknya jumlah anggota dalam keluarga Rumah Tangga Sasaran akan berdampak pada ketahanan pangan keluarga tersebut.
3. Pendistribusian yang terkendala dapat mengancam ketahanan pangan Rumah Tangga Sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokok yaitu beras.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah dengan adanya program Bansos Rastra dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan Rumah Tangga Miskin?
2. Apakah dengan banyaknya jumlah anggota keluarga dalam Rumah Tangga Sasaran akan berdampak pada ketahanan pangan keluarga?
3. Apakah dengan terkendalanya pendistribusian Bansos Rastra berakibat pada ketahanan pangan Rumah Tangga Sasaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk melakukan evaluasi program Bansos Rastra dapat mempengaruhi ketahanan pangan Rumah Tangga Sasaran.
2. Untuk melakukan evaluasi dengan banyaknya jumlah anggota keluarga dalam Rumah Tangga Sasaran akan berdampak pada ketahanan pangan.
3. Untuk mendeskripsikan dengan adanya kendala pendistribusian Bansos Rastra berakibat pada ketahanan pangan Rumah Tangga Sasaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Sebagai salah satu bahan kajian dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya mengenai pembangunan ekonomi yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat mengetahui secara jelas tujuan, manfaat, dan fungsi masyarakat melalui keikut-sertaanya dalam mensukseskan program-program penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat Negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan. Singkatnya, selama dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisikan ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan

kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro & Smith, 2011)

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*) 2) meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, pembangunan ekonomi, 2011) .

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011)

Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ialah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jika suatu saat nanti semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh maka

pertumbuhan output pun akan berhenti. Sedangkan sumber daya insani memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan)

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang hanya dibutuhkan adalah modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal

manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke 19 yaitu dimasa revolusi industri yang merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Pada waktu itu aliran ekonomi yang sedang berkembang adalah sistem liberal dan menurut aliran klasik ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan peningkatan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pertumbuhan kapital.

Kecepatan pertumbuhan kapital tergantung pada tinggi rendahnya tingkat keuntungan, sedangkan tingkat keuntungan ini tergantung pada sumber daya alam. Aliran klasik juga mengalami perkembangan dari beberapa pengamat aliran klasik, diantaranya Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus.

1. Teori Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Adam Smith adalah ahli Ekonomi Klasik yang paling terkemuka. Bukunya yang sangat terkenal berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth*

of Nations terbit tahun 1776. Ia meyakini berlakunya "doktrin hukum alam" dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang paling tahu terhadap kepentingannya sendiri sehingga sebaiknya setiap orang dibebaskan untuk mengejar kepentingannya demi keuntungannya sendiri. Ia penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijakan pasar bebas. Pasar persaingan sempurna adalah mekanisme pencipta keseimbangan otomatis yang akan menciptakan maksimisasi kesejahteraan ekonomi. Menurutny terdapat tiga unsur pokok sistem produksi, unsur-unsur tersebut adalah:

1. sumber daya alam yang tersedia
2. jumlah penduduk
3. stok barang modal

Jumlah sumber daya alam merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Maksudnya jika sumber daya alam belum digunakan sepenuhnya, jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output akan berhenti jika semua sumber daya alam telah digunakan secara penuh. Sedang sumber daya manusia mempunyai peran yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Besarnya upah cenderung sama dengan kebutuhan hidup minimum. Jika suatu saat tingkat upah diatas tingkat kebutuhan minimum maka tenaga kerja akan meningkat, persaingan dalam mencari kerja akan lebih tajam hal itu mendorong upah turun lagi sampai pada tingkat upah yang sama dengan besarnya tingkat kebutuhan minimum. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya angkatan kerja sedangkan persaingan para kapitalis dalam memperebutkan pekerja akan cenderung meningkatkan upah.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output, sedang jumlah dan pertumbuhan output tergantung pada pertumbuhan stok modal. Pemupukan modal harus dilakukan sebelum pembagian kerja. Pemupukan modal adalah syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi. Pemupukan modal dilakukan dengan cara menyetor pendapatan/ menabung. Hampir seluruh tabungan diperoleh dari penanaman modal atau penyewaan tanah sehingga hanya kaum kapitalis dan tuan tanah yang mampu menabung sedangkan kelompok pekerja tidak mampu menabung

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus

pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

2. Teori David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital.

Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang.

3. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*dicontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan, 2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi , mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

4. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (marginal product) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para

Pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka

industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

5. Teori Hollis B. Chenery

Hollis B. Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan

dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011)

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut,

1. Adanya akumulasi capital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.
2. Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua faktor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya juga mendukung.
4. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual,

keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional , serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan di bidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

C. Keynes

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian

yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi *Great Depression*, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh

pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segment masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Meynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya berjudul “*The General Theory Of Employment, Interest And Money*”. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrold Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Teori Keynes tidak dapat diterapkan pada setiap tatanan sosio-ekonomi. Ia hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. Sebagaimana tulis Schumpeter, “ajaran praktis Keynes merupakan bibit yang tidak dapat dipindahkan ke tanah seberang, ia akan mati di sana dan bahkan menjadi beracun sebelum mati. Tetapi ditanah Inggris, tanaman ini tumbuh dengan subur dan menjanjikan buah dan keteduhan.

Begitu juga dengan saran lain yang pernah dikemukakan Keynes. (Jhingan, M.L, 2010).

2.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Prof Rahardjo Adisasmita, dalam bukunya mengatakan bahwa ada beberapa indicator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut :

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, diman pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Peserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sector pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sector industry akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektir industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor.

Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sector pertanian, tetapi harus pula di orientasikan kepada sector industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis *finansial* Negara- Negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luar tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau keseluruhan kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dala sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sector-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diaertikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha (misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan, dan lainnya).

e. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut defenisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

2.1.3 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain :

- a. Sumber daya alam
- b. Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Sistem sosial
- e. Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional rill yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat

pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun.

2.1.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. (Boediono,1999)

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun

secara administrasi keduanya berbeda. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut

1. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} \dots \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

Keterangan :

GpC : Pengeluaran pemerintah Per kapita

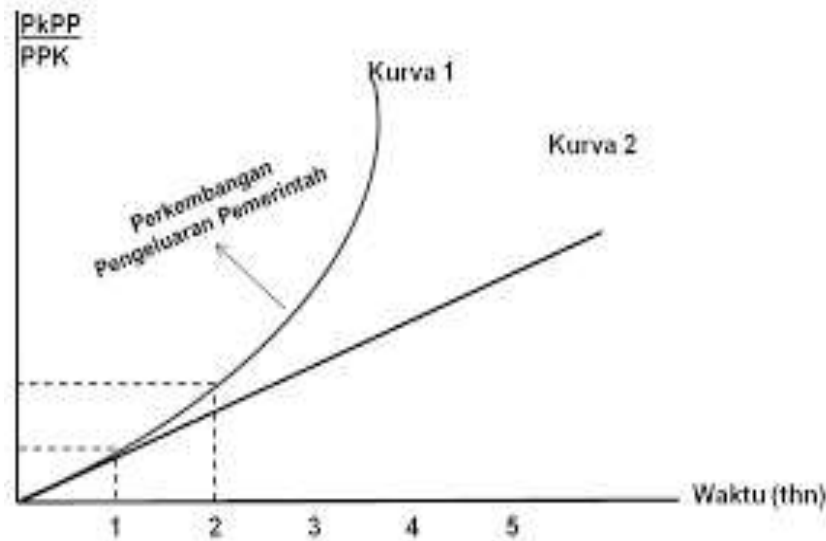
YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks Waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya

perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. (Mangkoesobroto, 1994)

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



Sumber: Mangkoesobroto, 1993

Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesobroto, 1993)

2. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus

memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian Universitas Sumatera Utara (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah

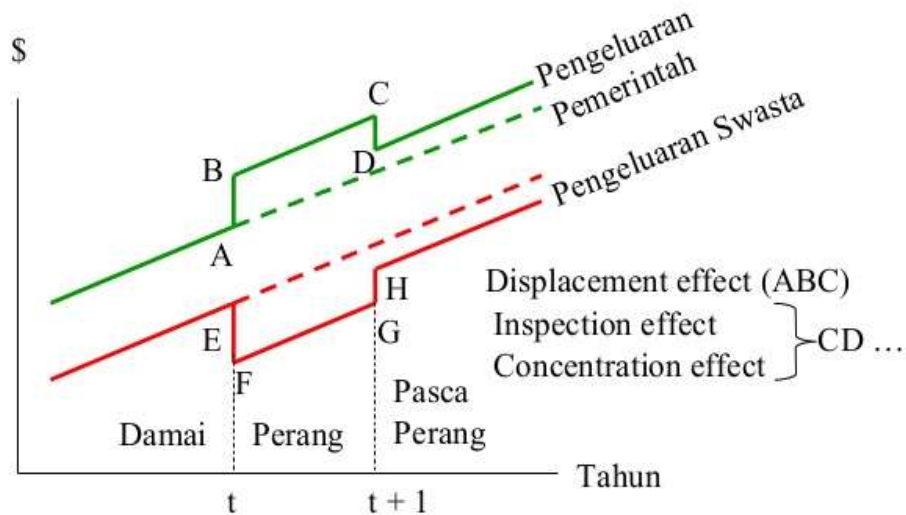
Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

TEORI PEACOCK & WISEMAN

Pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran, sementara masyarakat tidak suka menambah pembayaran pajak



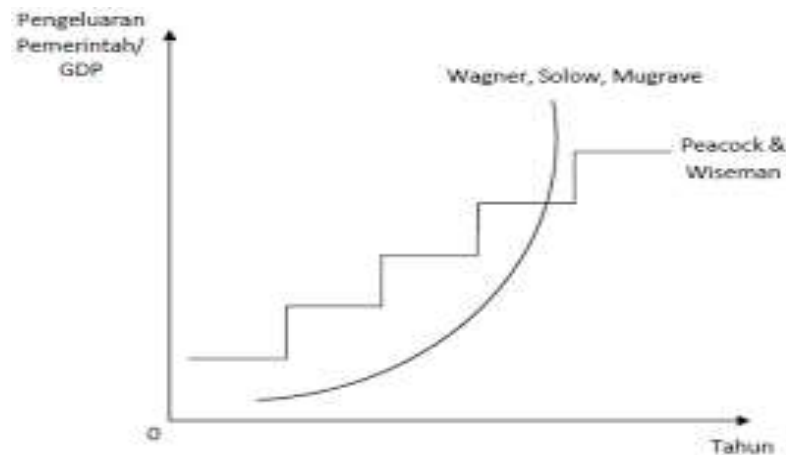
Sumber : Mangkoesubroto,1993

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan

pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat



Sumber : Mangkoesubroto, 1993

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Wagner, Solow, Musgrave Peacock & Wiseman Tahun Pengeluaran Pemerintah/ GDP Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

3. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2.1.5 Tinjauan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dihubungkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan (wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Kebijakan juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Oleh beberapa ahli maupun organisasi kebijakan diartikan sebagai berikut ini :

1. Friedrik (1963), berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya pencapaian tujuan.

2. Menurut PBB, kebijakan adalah suatu deklarasi mengenai dasar pedoman (untuk) bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
3. Anderson (1979), berpendapat bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (a purposive course of problem matter of concern).

Kebijakan bisa juga diartikan sebagai mekanisme politis, finansial, manajemen, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan dapat berbentuk keputusan punca dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram, atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Jadi kebijakan merupakan seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya.

2.2.1 Tinjauan Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok.

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” dengan mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an”. Miskin diartikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedangkan kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian orang yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, yakni orang yang tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan nafkah untuk makan

dan kebutuhan lainnya seperti pakaian, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah nilai garis standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Menurut Oscar Lewis kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti : malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti : birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya.

Freidman (dalam Usman, 2006 : 43) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, sindikasi, koperasi dan lain-lain), tetapi juga pada (2) net work atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain, (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Kemiskinan bisa diartikan sebagai situasi yang serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Dengan demikian mengentaskan penduduk

miskin itu perlu bantuan pihak luar dan si miskin itu sendiri. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang memiliki sesuatu namun sedikit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2003) menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Pengertian kemiskinan secara sederhana selalu dikaitkan dengan rendahnya pendapatan dan kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana diungkapkan oleh Tadjudin Noer Effendi bahwa : kemiskinan sekelompok orang yang dikaitkan pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan hanya mengacu kepada kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Bila pendapatan seseorang atau keluarga tidak minimum maka orang dan keluarga itu dapat dikategorikan miskin (Tadjudin Noer Effendi, 1995 : 202)

Kemiskinan (poverty) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan yang tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

- 1) Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan > Rp. 350.610.

- 2) Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488- Rp. 350.610.
- 3) Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp. 280.488.
- 4) Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740.
- 5) Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. Jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis (Adrianus Meliala, Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012),

Dari banyaknya definisi kemiskinan, kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan. Kajian tersebut dapat terlihat pada definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers dan definisi tersebut yang saat ini mendapat perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang. Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi yaitu:

- a. Kemiskinan (proper)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (powerless)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of Emergency)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (dependence)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (isolation)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasar, yaitu ketidakmampuan dalam: (1) melakukan kegiatan usaha produktif, (2) menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi, (3) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebab kemiskinan memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. **Kemiskinan Struktural**

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan perilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

Setelah mengenal bentuk kemiskinan berikut ini adalah jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya:

a. **Kemiskinan Alamiah**

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. **Kemiskinan Buatan**

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi penelitian ini, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

B. Penyebab-penyebab Kemiskinan

Menurut Ginanjar Kartasasmita (Gianjar Kartasasmita, 1997 : 15) sekurang-kurangnya ada empat hal penyebab kemiskinan.

1. Rendahnya Taraf Pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya Derajat Kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya Lapangan Kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan rantai kemiskinan itu.
4. Kondisi Terisolasi. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerakan kemajuan yang dinikmati masyarakat lain.

Keempat penyebab yang diuraikan di atas menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan berpusat di daerah pedesaan. Karena berpendidikan rendah produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibatnya rumah tangga miskin menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi penerusnya.

Dr. Mustopa Husni Assiba'i berpendapat bahwa kemiskinan itu disebabkan sebagai berikut :

1. Kemalasan atau keteledoran.
2. Ketidakmampuan bekerja dan kehilangan syarat-syarat untuk bekerja.

Secara mendasar penyebab kemiskinan itu ada dua yaitu : pertama, penyebab yang disebabkan oleh individu, dalam hal ini individu tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk berkreasi yang didasari oleh rendahnya pendidikan sehingga individu tersebut tidak dapat berkreasi. Kedua, penyebab yang di sebabkan oleh garis struktural yang ada. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan akses dan kesempatan karena telah terjadinya diskriminatif.

C. Indikator Kemiskinan

Rendahnya tingkat pendapatan dan penghasilan ekonomi keluarga atau yang disebut dengan keluarga miskin tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, menurut BPS (2008) indikator kemiskinan terdiri atas :

1. Rumah yang tidak permanen
2. Sempitnya luas tanah yang ditempati

3. Kualitas kesehatan yang buruk
4. Lingkungan keluarga yang tidak sehat
5. Kualitas makanan/kalori yang dikonsumsi tidak memadai dari sisi kesehatan
6. Fasilitas air minum
7. Fasilitas jamban/WC
8. Aset keluarga
9. Status tanah tempat tinggal (Sjafari,2014 : 4-5)

Selaras dengan sulitnya menerapkan kebutuhan minimum, maka kriteria kemiskinan pun sulit untuk ditetapkan secara tegas. Jika dikaji secara mendalam, indikator kemiskinan yang beraneka ragam dihasilkan melalui tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan diyakini dapat menghasilkan rumusan indikator kemiskina yang refresentatif sebab dapat mempengaruhi seseorang mampu atau tidak mampu untuk hidup layak. Sajogyo mengemukakan bahwa indikator kemiskinan sebaiknya tidak diukur dengan mata uang, melainkan dalam ukuran beras

Untuk masyarakat desa, indikator kemiskinan menurut pendapatan dalam ukuran beras adalah :

- a) Miskin : 320 Kg
- b) Miskin Sekali : 240 Kg
- c) Paling Miskin : 180 Kg

Sedangkan untuk masyarakat kota indikator kemiskinan menurut pendapatan dalam ukuran beras adalah

- a) Miskin : 480 Kg
- b) Miskin Sekali : 360 Kg
- c) Paling Miskin : 270 Kg

2. Pensekatan Konsumsi

BPS berusaha merumuskan indikator kemiskinan dalam bentuk konsumsi. Badan ini menetapkan bahwa manusia hanya akan hidup layak jika mengkonsumsi makan dan minuman dengan kandungan minimal 2100 Kalori perkapita perhari. Sehingga seorang dikatakan miskin jika uang yang di belanjakan untuk memenuhi konsumsi kurang dari 2100 Kalori perkapita perhari.

3. Pendekatan Multi Aspek

PBB menetapkan 12 jenis komponen yang harus digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan manusia melalui laporan PBB I berjudul *Report On International Defenation and Measurment of Standard and Level of Living* meliputi :

- 1) Kesehatan, termasuk kondisi demografi
- 2) Makanan dan gizi
- 3) Pendidikan, termasuk *literacy* dan *skill*
- 4) Kondisi pekerjaan
- 5) Situasi kesempatan kerja
- 6) Konsumsi dan tata hubungan agregatif
- 7) Pengangkutan
- 8) Perumahan, termasuk fasilitas-fasilitas perumahan

- 9) Sandang
- 10) Rekreasi dan hiburan
- 11) Jaminan sosial
- 12) Kebebasan manusia (Siagian, 2012 : 74)

Indikator utama menurut BAPPENAS dapat dilihat dari :

1. Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak
2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif
3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis
4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi
6. Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah
7. Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas

Munurut Bank Dunia indikator Kemiskinan yaitu :

- a. Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- c. Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat
- d. Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi
- e. Rendahnya produktivitas
- f. Budaya hidup yang jelek
- g. Tata pemerintahan yang buruk
- h. Dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan

2.3.1 Tinjauan Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu kajian yang sangat penting. Secara umum teori efektivitas merupakan sebuah konsep untuk mengukur produktivitas.

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu. Gibson (2002) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama. Menurut Dunn (2003) efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Pengukuran terhadap konsep efektivitas menurut Makmur (2008) adalah keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses (*conversion*), dan keluaran (output).

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuwan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
2. Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007).

Menurut pendapat Mahmudi efektivitas ialah hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, akan semakin efektif pula suatu organisasi, program atau kegiatan yang telah dirancang. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely* (Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Komaruddin menambahkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian Hidayat mengatakan bahwa efektivitas ialah sebuah ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. (Hidayat, *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986).

Menurut Siagian efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas dapat menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2007).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu

program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, ada empat hal yang merupakan unsur-unsur efektivitas yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang ditentukan.
3. Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
4. Hasil, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan waktu dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan padanya.

A. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan sasaran

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

2. Pendekatan sumber

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga berujung pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Tahap proses (*conversion*) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi

agar dapat menghasilkan nilai. Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya.

2.4.1 Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra)

Program beras sejahtera (RASTRA) merupakan bagian dari sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan, karena merupakan salah satu dari hak asasi manusia sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1995, Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap ketahanan pangan nasional, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama sehingga menjadikan beras sebagai komoditas nasional yang sangat strategis.

Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditas makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program Rastra merupakan implementasi dan instruksi tentang kebijakan perberasan nasional.

2.4.2 Tujuan Program Bansos Beras Sejahtera (Rastra)

Tujuan program ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemberian bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

2.4.3 Manfaat Beras Sejahtera (Rastra)

Adapun manfaat Program beras sejahtera (Rastra) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi(dialurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus)kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

2.4.4 Penyaluran Bansos Rastra ke Titik Distribusi (TD)

Perum BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik / pergudangan, survei dan pemeberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran.

- Perum BULOG bertanggung jawab menyalurkan Bansos Rastra sampai ke Titik Distribusi.

- Pada prinsipnya waktu penyaluran Bansos Rastra dilakukan setiap bulan.
- Kemasan Bansos Rastra untuk Januari paling lambat Mei 2018 menggunakan karung kapasitas 15 kg yang disablon dengan tulisan 10 kg. Selanjutnya, mulai bulan Juni 2018 menggunakan kemasan karung kapasitas 10 kg.
- Serah terima Bansos Rastra antara Satker Bansos Rastra Perum BULOG dengan Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Pelaksana Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Satker Bansos Rastra Perum BULOG di TD.
- Jika kuantitas dan /kualitas Bansos Rastra yang diserahkan oleh Prum BULUG di TD tidak sesuai ketentuan, maka Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2x24 jam harus memenuhi kekurangan kuantitas Bansos Rastra dan/ menggantikan dengan kualitas yang sesuai.
- Segala biaya yang timbul dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Perum BULOG.

2.4.5 Penyaluran Bansos Rastra ke TB hingga ke KPM

- TB ditetapkan di tempat/lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan.

- TB dilengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran Bansos Rastra.
- Pelaksanaan Distribusi menyalurkan Bansos Rastra kepada KPM di TB dengan menyerahkan Bansos Rastra sejumlah 10 kg/bulan tanpa dikenakan harga/biaya tebus.
- Pemerintah mengalokasikan APBD untuk mendukung pelaksanaan Bansos Rastra, terutama untuk membiayai penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB agar KPM tidak dikenakan biaya apapun saat menerima Bansos Rastra di TB.
- Untuk KPM berkebutuhan khusus (seperti: KPM lansia, penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi di tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
- Penyaluran Bansos Rastra kepada KPM dituangkan dalam DPM-2.
- Dokumen DPM-2 untuk setiap penyaluran Bansos Rastra dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Dinas Sosial Kab/Kota.
- Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh alokasi Bansos Rastra sesuai dengan Pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk setiap periode penyaluran.

2.5.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Adapun tiga pilar ketahanan pangan yang dijadikan panutan dalam Perum BULOG antara lain :

1. Pilar I : Ketersediaan (*Availability*)
2. Pilar II: Keterjangkauan fisik dan Ekonomi (*Accessibility*)
3. Pilar II: Stabilitas pasokan dan harga (*Stability*)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil penelitian
Lailan Sakina	Evaluasi Program Beras Sajahtera (Rasrta) di Kelurahan Matahalan Kecamatan Tanjung Balai Utara	2018	Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjung Balai Utara sudah berjalan cukup baik di titik distribusi, dan cukup mampu mengatasi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
Elvira Astuti Pane	Efektifitas Program Beras Sejahtera (Rastra) Untuk Masyarakat Miskin di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggiraja Kabupaten Asahan	2018	Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: a) Pemahaman program beras sejahtera di Desa Sumber Harapan Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan sudah berjalan efektif. b) Ketepatan sasaran, bahwa pemilihan rumah tangga

			<p>miskin penerima manfaat sudah tepat sasaran. c) Ketepatan waktu, bahwa proses pelaksanaan program Rastra sudah efektif. d) Tercapainya tujuan, bahwa tujuan Rastra sudah efektif.</p>
Magayana Masta	<p>Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus</p>	2016	<p>Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan: 1) Implementasi Distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus secara umum belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan 6T. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus yaitu terdiri dari faktor internal dan eksternal.</p>
Rini Oktarika Ermawati	<p>Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin pada Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta</p>	2011	<p>Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga pada Daerah Rawan Banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengeluaran konsumsi pangan masih mengambil bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga miskin pada daerah rawan banjirdi Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 2) Rata-rata konsumsi energi dan protein rumah tangga miskin pada daerah rawan</p>

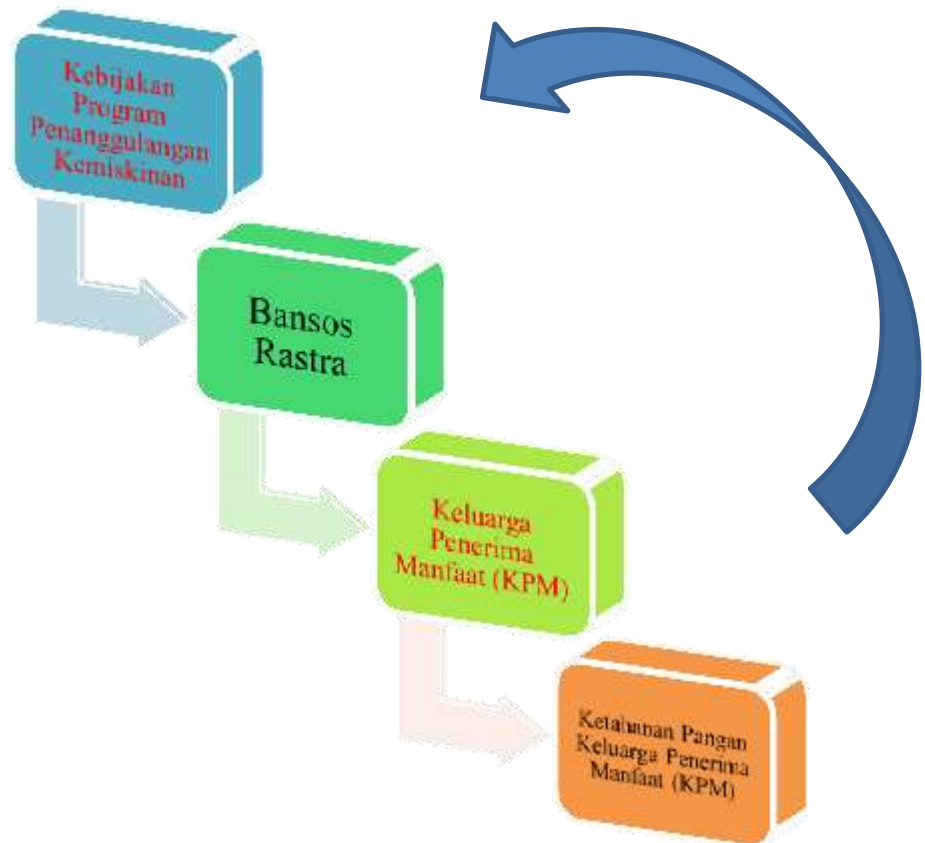
			<p>banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta masih kurang dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan. 3) Proporsi pengeluaran konsumsi pangan dengan konsumsi energi dan protein mempunyai hubungan yang signifikan. 4) Kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin pada daerah rawan banjir di Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah rumah tangga kategori rawan pangan sebesar 60%, kurang pangan 26,67%, dan rentan pangan sebesar 13,33%.</p>
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah analisis studi deskriptif tentang efektivitas program Bansos Rastra terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Tanjung Pura.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto. 1995 : 310). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (dalam Moleong. 2002:3)

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberikan kemungkinan ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna di lapangan.

Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari mana. Adapun definisi operasional variabel

dalam penelitian ini sebagai berikut: (Husein Umar, “*Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang di inginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yakni : Program Rastra dan Ketahanan pangan.

Tabel 3.1

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Opersional	Indikator
Program Rastra	Merupakan bantuan sosial yang berupa beras yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin	Menurut BAPPENAS Kemiskinan : 1. Kurangnya Pangan, Sandang dan Perumahan yang tidak layak 2. Terbatasnya Kepemilikan Tanah dan Alat-alat Produktif 3. Kurangnya Kemampuan Membaca dan Menulis 4. Kurangnya Jaminan dan Kesejahteraan Hidup 5. Kerentanan dan Keterpurukan dalam Bidang Sosial dan Ekonomi 6. Ketakberdayaan atau Daya Tawar Rendah 7. Akses Terhadap Ilmu Pengetahuan yang Terbatas.
Ketahanan Pangan	Kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok	Ketahanan Pangan : 1. Kecukupan Ketersediaan Pangan 2. Stabilitas Ketersediaan Pangan 3. Ketejangkauan Terhadap Pangan 4.

		Kualitas/Keamanan Pangan
--	--	--------------------------

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura. Hal ini di dasari fakta bahwa telah dilaksanakan program pemerintah berupa Bansos Beras Sejahtera (Rastra).

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yakni pada Desember 2018 sampai dengan selesai.

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data, pengajuan judul dan pengesahan judul																				
2	Penulisan Proposal																				
3	Seminar Proposal																				
4	Analisis Data																				
5	Penulisan dan Laporan																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian itu sendiri. Menurut Kuncoro (2001 : bab 3). Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga penerima Bansos Rastra di Kecamatan Tanjung Pura.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, keseluruhan tentang populasi diharapkan dapat diperoleh. Cooper dan Pamela (2001). Keunggulan ekonomis mengambil sampel adalah agar lebih mudah dan memberikan hasil yang lebih cepat.

Dalam hal ini peneliti menggunakan *Sampling Insidental* yaitu merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau insidenta, artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan atau $\alpha = 15\%$ dengan derajat kepercayaan 85%, artinya peneliti yakin bahwa dalam hal mengestimasi parameter populasi tingkat kebenarannya 85%. Alasan peneliti

menggunakan $\alpha=15\%$ karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian.

Maka dalam hal penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{6.863}{1 + 6.863 \times 15\%^2}$$
$$n = \frac{6.863}{155,4175} = 44$$

Dimana :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

e = Person Kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 15%.

Dari hasil yang diperoleh menggunakan rumus Slovin sampel yang diambil sebanyak 44 responden yang terdapat di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel yang masih d tolerir atau diinginkan, yaitu 15%.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara pada subjek yang akan diteliti yaitu : Para penerima Bansos Rastra.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat/dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Sedangkan data sekunder yaitu data yang di dapat dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Langkat, di download melalui media Internet, catatan-catatan, arsip, jurnal, media cetak, dan dokumen-dokumen lain serta data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Tanjung Pura.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah atau persoalan. Data primer yang dikumpulkan dilapangan berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring dengan berkembangnya teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan dengan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, whatsapp.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, mendengar, dan mencatat sejumlah taraf dan aktifitas tertentu atau situasi tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yang peneliti lakukan dalam kegiatan observasi adalah melihat kebijakan pemerintah melalui Bansos Rastra terhadap ketahanan pangan luarga penerima manfaat.

3. Angket (kuisisioner)

Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti mengetahui dengan variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuisisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar di wilayah yang luas.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan satu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan di bahas. Karena penelitian ini bersifat deskriptif (penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain), maka penulis hanya mengevaluasi ketahanan pangan keluarga penerima manfaat Bansos Rastra dalam bentuk kuisisioner atau wawancara. Secara deskriptif adalah merumuskan, menafsirkan, data yang diperoleh, mengalokasikan, menganalisa, dan mengadakan interpretasi sehingga memberikan gambaran yang nyata bagi masalah yang dihadapi. Jenis data kualitatif ini adalah data nominal, dimana data tersebut dinyatakan dalam bentuk kategori, dan juga akan di deskripsikan dalam bentuk persentase dan grafik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Letak Geografi Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dengan luas 6.272 km² dan berpenduduk sejumlah 902.986 jiwa. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14' 00' – 4° 13' 00' Lintang Utara, 97° 52' 00' – 98° 45' 00' Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut.

Area Kabupaten Langkat memiliki Batas Wilayah sebagai berikut:

- Utara : Selat Malaka
- Selatan: Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang
- Barat : Kabupaten Aceh Tamiang (Provinsi Aceh)
- Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat, Luas daerah terbesar adalah kecamatan bahorok dengan luas 1.101,83 Km², diikuti Kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 Km². Tanjung Pura merupakan Kecamatan dengan luas daerah terbesar keempat dengan luas daerah sebesar 179,61 Km², sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km² dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Selama periode tahun 2015-2017, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Ada 2 Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak, yaitu Kecamatan Bahorok dan Tanjung Pura. Masing-masing terdiri dari 19 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan yang memiliki

desa/kelurahan paling sedikit ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai, Sawit Seberang dan Brandan Barat masing-masing terdiri dari 7 desa/kelurahan.

(Sumber : statistik daerah kabupaten langkat 2018)

Tabel 4.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Rasio terhadap Total (%)
1.	Bahorok	1.101,83	17,59
2.	Serapit	98,50	1,57
3.	Salapian	221,73	3,54
4.	Kutambaru	236,84	3,78
5.	Sei. Bingai	333,17	5,32
6.	Kuala	206,23	3,29
7.	Selesai	167,73	2,68
8.	Binjai	42,05	0,67
9.	Stabat	108,85	1,74
10.	Wampu	194,21	3,10
11.	Batang Serangan	899,38	14,36
12.	Sawit Seberang	209,10	3,34
13.	Padang Tualang	221,14	3,53
14.	Hinai	105,26	1,68
15.	Secanggang	231,19	3,69
16.	Tanjung Pura	179,61	2,87
17.	Gebang	178,49	2,85
18.	Babalan	76,41	1,22
19.	Sei. Lapan	280,68	4,48
20.	Brandan Barat	89,80	1,43
21.	Besitang	720,74	11,51
22.	Pangkalan Susu	151,35	2,42

23.	Pangkalan Jaya	209,00	3,34
	Jumlah	6.263,29	100,00

Sumber : www.langkatkab.go.id

4.2 Penduduk Kabupaten Langkat

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat mencapai 1.028.309 juta jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebanyak 7.101 jiwa. Selama tahun 2016-2017 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat meningkat sebesar 0,70 persen. Dengan kepadatan penduduk sebanyak 164 orang tiap km² tahun 2017. Secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 101,43.

Jumlah penduduk paling besar adalah kecamatan Stabat. Penduduk asli kabupaten langkat adalah suku Melayu sedangkan suku pendatang ialah suku Jawa, Karo, Batak (Toba & Simalungun), Mandailing, Minang, Aceh, Tionghoa, Tamil dan lain-lain. Walaupun Suku pendatang, Suku Jawa merupakan Suku Mayoritas di Kabupaten Langkat.

Mata pencarian utama penduduk Kabupaten Langkat adalah sebagai petani dan nelayan. Hasil utama pertanian dan perkebunan yang utama di Kabupaten Langkat adalah padi, jagung, kelapa, karet, dan kelapa sawit. (Sumber: BPS Langkat dalam Angka 2018). Berikut tabel jumlah penduduk Kabupaten Langkat :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan dan Jenis

Kecamatan	2016			2017		
	Kelamin, 2016-2017					
	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)			Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Bohorok	21065	20974	42039	21214	21114	42328
Sirapit	8453	8332	16785	8515	8385	16900
Salapian	13736	13596	27332	13833	13683	27516
Kutambaru	7183	6962	14145	7232	7006	14238
Sei Bingai	25558	25562	51120	25676	25815	51491
Kuala	20568	20721	41289	20715	20861	41576
Selesai	36845	36369	73214	37108	36623	73731
Binjai	22741	22089	44830	22916	22252	45168
Stabat	42991	43877	86868	43320	44207	87527
Wampu	21700	21116	42816	21851	21255	43106
Batang Serangan	18837	18085	36922	18969	18204	37173
Sawit Seberang	13312	13259	26571	13406	13345	26751
Padang Tualang	24522	24695	49217	24691	24858	49549
Hinai	25376	25038	50414	25549	25202	50751
Secanggang	34695	34212	68907	34935	34441	69376
Tanjung Pura	34294	33696	67990	34537	33927	68464
Gebang	22615	22251	44866	22768	22397	45165
Babalan	30286	29219	59505	30494	29411	59905
Sei Lapan	25137	24230	49367	25312	24392	49704
Brandan Barat	11869	11262	23131	11958	11336	23294
Besitang	22947	22947	46359	23578	23098	46676
Pangkalan Susu	22030	21789	43819	22189	21936	44125
Pematang Jaya	6986	6716	13702	7088	6757	13795
Kabupaten Langkat	514211	506997	1021208	517804	510505	1028309

Sumber : BPS Langkat 2018

Penduduk di Kecamatan Tanjungpura termasuk pada kelas menengah ke bawah karena sebagian besar mata pencarian hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja. Dalam tabel dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Tanjungpura 67.990 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 68.464. Selama 1 tahun jumlah penduduk Tanjung pura bertambah sebanyak 474 jiwa.

4.3 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Langkat masih sekitar 11,36 persen tahun 2016, turun

menjadi 11,15 persen pada tahun 2017. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2016 tercatat 115.790 jiwa, atau naik dibandingkan penduduk miskin tahun 2017 yang tercatat sebanyak 114.410 jiwa. (*sumber: BPS Langkat dalam Angka 2018*).

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Selama periode tahun 2016-2017, angka IPM Kabupaten Langkat mengalami peningkatan yakni tahun 2016 sebesar 69,13 naik menjadi 69,82 tahun 2017. Angka IPM ini masih berada pada kriteria menengah atas, berarti masih harus lebih ditingkatkan lagi pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan.

4.4 Sejarah Ringkas Kecamatan Tanjung Pura

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Daerah tingkat II Kabupaten Langkat masih berstatus sebagai Asisten Keresidenan dan Kesultanan (raja).

Pada masa itu tercatat ada 3 (tiga) Sultan yang pernah memegang Kekuasaan yaitu :

- Sultan Pertama adalah Sultan Al Haj
- Sultan Kedua adalah Sultan Abdul Aziz
- Sultan Ketiga adalah Sultan Mahmud

Pada sekitar tahun 1947s/d 1949 terjadi Agresi Militer I dan II, Kabupaten Langkat dari segi pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- Pemerintahan Negara Sumatera Timur berkedudukan di Binjai dengan Kepala Pemerintahnya Wan Umaruddin

- Negara Kesatuan RI untuk Langkat berkedudukan di Pangkalan Brandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidullah.

Pada Agresi Belanda I (21 Juli 1947) hampir semua daerah Kabupaten Langkat jatuh ketangan Belanda dan terakhir 4 Agustus 1947 Kota Tanjung Pura diduduki Belanda. Kesatuan untuk daerah Sumatera Timur menetapkan Pejabat Pimpinan Pemerintahan disemua Kabupaten Langkat yang berkedudukan di Binjai dan sebagai Bupatinya H.O.K. Salamuddin, sejak itu pula resmilah Ibukota Kabupaten Langkat di pindahkan dari Pangkalan Brandan ke Kota Binjai.

Dalam perkembangan selanjutnya, keluarlah Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, dengan membawahi 3 (tiga) Wilayah Kewedanaan dengan 15 (lima belas) Kecamatan yaitu :

1. Kewedanaan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai dengan 6 (enam)

Kecamatan :

- Kecamatan Bahorok
- Kecamatan Salapian
- Kecamatan Kuala
- Kecamatan Selesai
- Kecamatan Sei Bingei
- Kecamatan Binjai

2. Kewedanaan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura dengan 5 (lima)

Kecamatan :

- Kecamatan Stabat
- Kecamatan Secanggang

- Kecamatan Hinai
 - Kecamatan Padang Tualang
 - Kecamatan Tanjung Pura
3. Kewedanaan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan 4 (empat) Kecamatan :
- Kecamatan Gebang
 - Kecamatan Besitang
 - Kecamatan Pangkalan Susu
 - Kecamatan Pangkalan Brandan

Dalam kewedanaan secara berjenjang turun, Struktur Pemerintahannya disebut Asisten Wadana dan Kampung (Desa). Pada tanggal 1 Oktober 1964 dilakukan likuedasi/ Penghapusan terhadap Wilayah Kewedanaan dan sejak ini pula Pangkalan Brandan hanya Ibukota Kecamatan Babalan. Sementara itu istilah Asisten Wedana sebutannya menjadi Camat, tugas dan wewenang dan penanggung jawabnya langsung kepada Bupati Langkat.

Dalam perkembangan berikutnya, Daerah Tingkat II Langkat dibagi dalam 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati :

1. Wilayah Kerja Pembangunan I Langkat Hulu berkedudukan di Kuala.
2. Wilayah Kerja Pembangunan II Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura.
3. Wilayah Kerja Pembangunan III Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Susu.

Seperti yang telah kami singgung di atas, dengan keluarnya Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten-

Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara, maka sekaligus Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Langkat, saat itu Kecamatan Tanjung Pura mempunyai 16 (enam belas) Desa dan pada Tahun 1980 Desa Pekan Tanjung Pura statusnya berubah menjadi Kelurahan Pekan Tanjung Pura.

Dalam perkembangan berikutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2003, Desa Pantai Cermin dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa dan kemudian perkembangan berdasarkan Perda Kabupaten Langkat Nomor xx Tahun 2006 Desa Pematang Cengal dimekarkan menjadi 2 (dua) desa. Dengan demikian saat ini jumlah desa/kelurahan menjadi 19 (Sembilan belas) desa/kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Pekan Tanjung Pura
2. Desa Serapuh Asli
3. Desa Pematang Tengah
4. Desa Paya Perupuk
5. Desa Pekubuan
6. Desa Teluk Bakung
7. Desa Baja Kuning
8. Desa pematang Sungai
9. Desa Pulau Banyak
10. Desa Lalang
11. Desa Pantai Permin
12. Desa Pematang Cengal
13. Desa Bubun
14. Desa Tapak Kuda

15. Desa Kwala Langkat

16. Desa Kwala Serapuh

17. Desa Karya Maju

18. Desa Suka Maju

19. Desa Pematang Cengal Barat

4.4.1 Letak dan Geografis Tanjung Pura

Tanjung Pura terletak antara Lintang Utara : $03^{\circ} 53' 17''$ - $04^{\circ} 02' 38''$, Bujur Timur : $98^{\circ} 24' 52''$ - $98^{\circ} 29' 46''$, letak diatas permukaan laut : 4 meter, Luas Wilayah : 17.961 Ha (179,61 Km^2), dan Berbatasan dengan Sebelah Utara : Selat Malaka, Sebelah Selatan : Kec. Hinai dan Kec. Pd Tualang, Sebelah Barat : Kec. Gebang, Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kec. Secanggang. Dan jarak Kantor Camat ke Kantor Bupati : 18 Km^2

4.4.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

Luas Wilayah Kecamatan Tanjung Pura menurut Desa/Kelurahan dipaparkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 4.3

Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

No	Desa / Kelurahan	Luas (Km^2)	Rasio terhadap total Luas Kecamatan (%)
1	Serapuh Asli	1,10	0,61
2	Pematang Tengah	1,55	0,86
3	Paya Perupuk	1,52	0,85
4	Pekan T. Pura	1,79	1,00

5	Lalang	1,77	0,99
6	Pantai Cermin	11,42	6,36
7	Pekubuan	5,82	3,24
8	Teluk Bakung	2,59	1,44
9	Pematang Serai	4,10	2,28
10	Baja Kuning	2,57	1,43
11	Pulau Banyak	12,94	7,20
12	Pematang Cengal	27,92	15,54
13	Kwala Serapuh	17,52	9,75
14	Kwala Langkat	13,81	7,69
15	Bubun	18,42	10,26
16	Tapak Kuda	22,75	12,67
17	Karya Maju	13,83	7,70
18	Suka Maju	10,69	5,95
19	Pematang Cengal Barat	7,50	4,18
Jumlah		179,61	100,00

Sumber : BPS Langkat 2017

4.5 Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra)

Kementrian Sosial (2018) menyatakan bahwa Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah strategi dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam bentuk pangan yang dilakukan secara nasional. Tahun 2018 menjadi awal peralihan yang semula berpola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan program Bansos Rastra, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat biaya/harga tebusan yang harus di

tanggung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut jumlah penerima Bansos Rastra di Kabupaten Langkat.

Perum BULOG dalam pelaksanaan program Bansos Rastra bertugas untuk mendistribusikan hingga Titik Distribusi (TD). Kemudian pemerintah Kabupaten /Kota bertanggung jawab dalam pendistribusian ke Titik Bagi (TB). Penyaluran Bansos Rastra dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Bansos Rastra diharapkan dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan dasar pangan masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi pengeluaran masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Mekanisme pelaksanaan program Bansos Rastra tidak mengalami banyak perubahan dengan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan hingga 2017, terkecuali dalam hal pertanggung jawaban dalam proses penyaluran, hingga dukungan serta peran aktif pemerintah Kabupaten/ Kota sangat diharapkan. Adapun jumlah penerima Bansos Rastra di Kabupaten Langkat tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura sebagai berikut :

Tabel 4.4

Jumlah penerima Bansos Rastra di Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)
1.	Bahorok	3.454
2.	Sirapit	1.534
3.	Kuala	2.280
4.	Selesai	5.206
5.	Binjai	2.066
6.	Stabat	5.968

7.	Wampu	2.861
8.	Batang Serangan	1.979
9.	Sawit Seberang	1.515
10.	Secanggang	6.806
11.	Tanjung Pura	6.863
12.	Gebang	4.459
13.	Babalan	5.892
14.	Sei Lapan	1.169
15.	Brandan Barat	2.762
16.	Besitang	5.059
17.	Pangkalan Susu	3.676
18.	Pematang Jaya	1.443
19.	Salapian	2.076
20.	Kutambaru	793
21.	Sei Bingei	2.882

<https://sumut.antaraneews.com/berita/156150/penerima-rastra-di-langkat-82052->

rts

4.6 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.6.1 Karakteristik Penerima Bansos Rastra

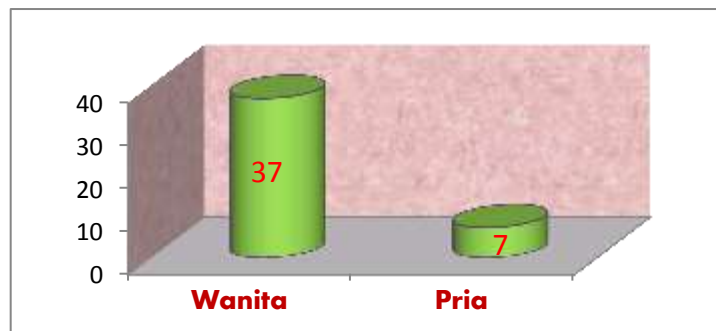
Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Bansos Rastra (2018) penerima manfaat Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk dalam daftar KPM yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data sumber KPM Bansos Rastra adalah Dat

Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM), yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada 44 orang penerima Bansos Rastra di Kecamatan Tanjung Pura. Daftar Pertanyaan yang disusun langsung kepada peserta melalui kuesioner wawancara. Adapun karakteristik responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan keluarga penerima Bansos Rastra. Berikut ini rincian mengenai karakteristiknya.

1. Penerima Bansos Rastra Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 4.1



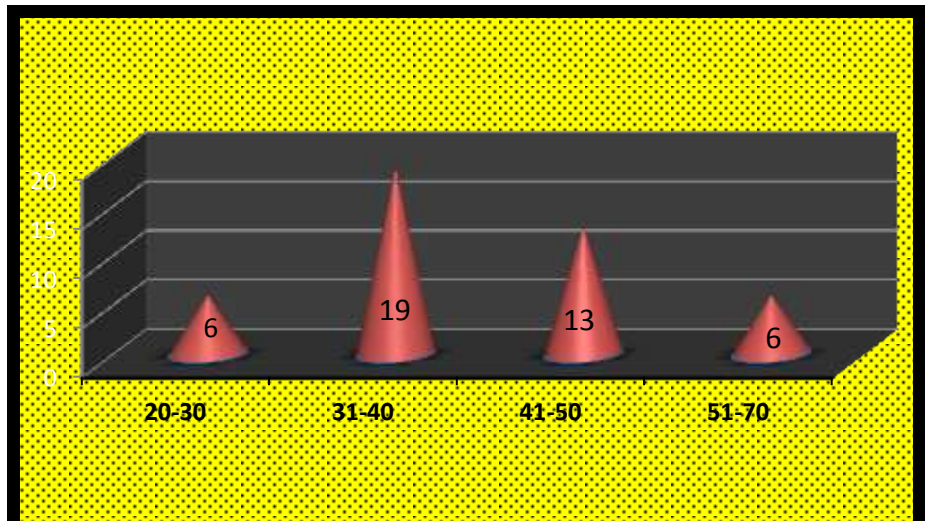
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan data yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa responden wanita lebih mendominasi yaitu sebanyak 37 orang (84,1%), sedangkan responden pria sebanyak 7 orang (15,9%). Hal tersebut dikarenakan pada saat peneliti membagikan kuesioner di desa tersebut rata-rata responden yang peneliti jumpai adalah responden wanita yang memiliki pekerjaan sampingan maupun hanya ibu rumah tangga. Sedangkan suami responden sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

2. Penerima Bansos Rastra Berdasarkan Usia

Penerima Bansos Rastra Berdasarkan Usia dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

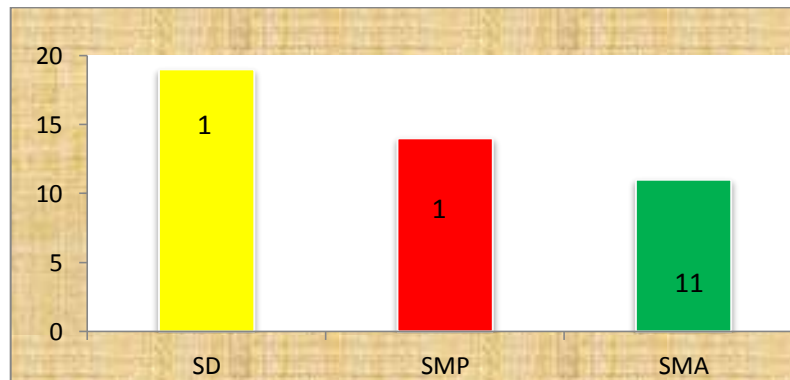
Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa usia paling banyak adalah usia pertengahan yakni 31-40 tahun 19 responden (43,2%) dimana usia tersebut masih dalam kategori usia produktif , hal ini karena rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka susah mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka yang berdampak langsung pada rendahnya pendapatannya keluarga. Pada urutan kedua 13 responden dengan persentase (29,5%) di rentan usia 41-50 tahun dimana pada usia tersebut tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya rentan usia 20-30 tahun sebanyak 6 responden dengan persentase (13,6%) yang masih sangat produktif yang tentu saja diharapkan dapat memperbaiki kehidupan mereka untuk terlepas dari permasalahan perekonomian. Dimana dengan usia yang masih produktif tersebut diharapkan mereka dapat mencari penghasilan tambahan melalui usaha kecil-kecilan. Dan usia 51-70 tahun sebanyak 6 orang dengan

persentase yang sama yakni (13,6%) dimana responden dengan usia tersebut sudah tidak lagi produktif dan hanya dapat mengharapkan bantuan dari keluarga serta masyarakat saja.

3. Penerima Bansos Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi, Sebab semakin rendahnya pendidikan seseorang maka pendapatan orang tersebut juga akan rendah. Berikut data responden penerima Bansos berdasarkan Tingkat pendidikan.

Gambar 4.3



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

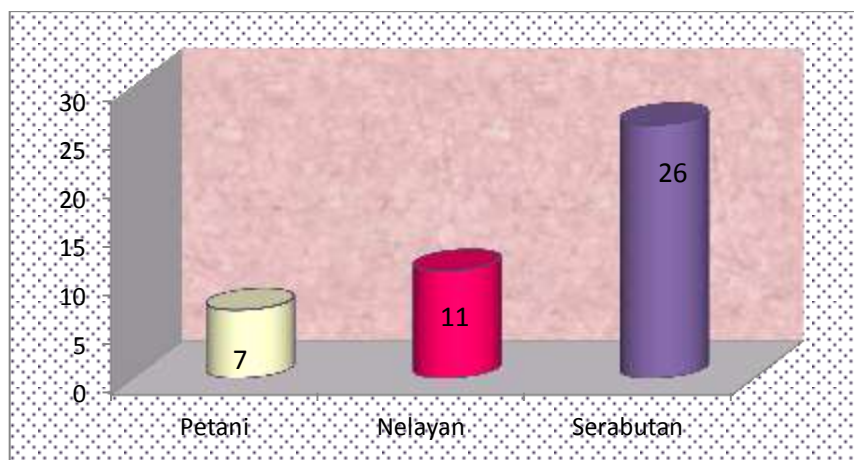
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pendidikan responden relatif rendah, hanya ada 11 responden yang tamat SMA (25%), 14 responden yang tamat SMP (31,8%), dan kebanyakan responden hanya menamatkan pendidikannya pada tingkat SD yaitu sebanyak 19 responden (43,2%). Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran responden akan pentingnya pendidikan, kebanyakan perekonomian responden yang rendah menjadi salah satu penyebab responden tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Tentu saja hal tersebut berdampak langsung pada responden yang hanya dapat bekerja dengan mengandalkan tenaga dan penghasilan yang rendah. Belum lagi anggapan

terdahulu yang menyebutkan perempuan nantinya hanya bekerja didapur pada saat menikah menambah faktor rendahnya tingkat pendidikan responden.

4. Penerima Bansos Rastra Berdasarkan Pekerjaan Suami

Bansos Rastra adalah program yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin yang berpendapatan rendah dan tidak tetap dengan pekerjaan sebagai berikut :

Gambar 4.4



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

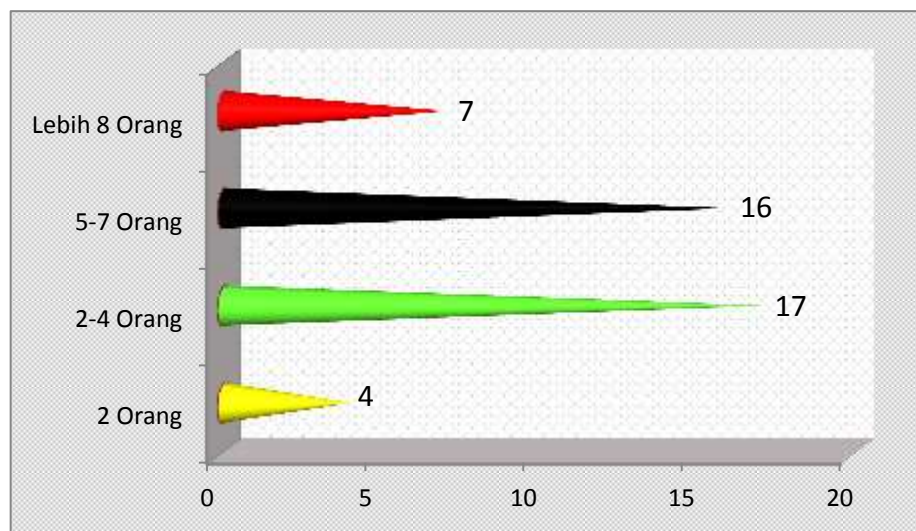
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi responden dengan pekerjaan yang mendominasi adalah serabutan yaitu sebanyak 26 responden (59,1%), hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja di daerah tersebut serta kurangnya keterampilan. Adapun kategori yang dikatakan dalam pekerjaan serabutan yakni orang yang mampu mengerjakan beberapa jenis pekerjaan dalam setiap harinya. Responden yang bekerja sebagai nelayan sebanyak 11 responden (25,0%),hal ini dikarenakan masih terdapat laut daerah tersebut. Responden yang bekerja sebagai petani sebanyak 7 responden (15,9%) mereka memanfaatkan perkarangan rumah mereka dengan menanam ubi kayu, cabai serta sayuran.

4.6.2 Deskripsi Kuesioner

1. Distribusi Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Responden

Salah satu kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yaitu rumah tangga miskin yang menanggung anggota rumah tangga lanjut usia non potensial. Adapun jumlah anggota dari 44 responden dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.5



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota keluarga 2-4 orang sebanyak 17 responden (38,6%) dimana mereka hanya memiliki 1 anak atau 2 orang anak. Dan diikuti jumlah anggota keluarga 5-7 orang sebanyak 16 responden (36,4%), dari 16 orang tersebut kebanyakan mereka memiliki anak 3 atau lebih, jumlah anggota keluarga lebih dari 8 orang sebanyak 7 responden (15,9%), hal ini dikarenakan ada diantara keluarga tersebut yang merawat kedua orangtuanya. Dan jumlah anggota keluarga 2 orang sebanyak 4 responden, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki anak. Rata – rata jumlah anggota keluarga dari 44 responden sebanyak 5 orang dalam satu keluarga.

2. Distribusi Berdasarkan Jumlah anak Responden

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra salah satunya adalah rumah tangga miskin yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar. Berikut jumlah anak dari 44 responden :

Gambar 4.6



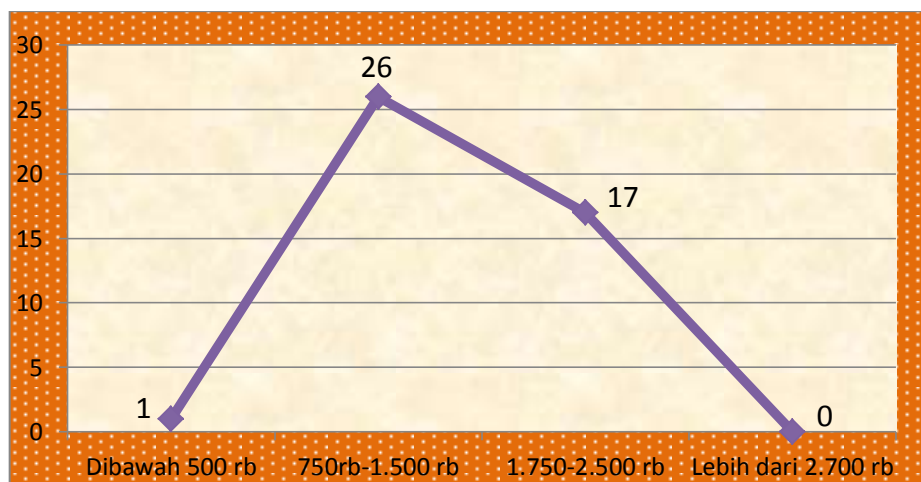
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar yang telah disajikan diatas, dapat dilihat bahwa yang tidak mempunyai anak sebanyak 4 responden (9,1%), jumlah anak 1 atau 2 orang 16 responden (36,4%), jumlah anak 3-5 orang 23 responden (52,3%), dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis rata-rata jumlah anak dalam satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebanyak 3 orang anak. dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyaknya jumlah anak dalam satu keluarga dapat berdampak pada ketahanan pangan keluarga. Dan jumlah anak yang lebih dari 6 orang 1 responden (2,3%).

3. Distribusi Berdasarkan Penghasilan /Bulan Responden

Salah satu kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni rumah tangga yang berpendapatan rendah. Berikut data pendapatan dari 44 responden yang telah diwawancarai melalui kuesioner oleh peneliti :

Gambar 4.7



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

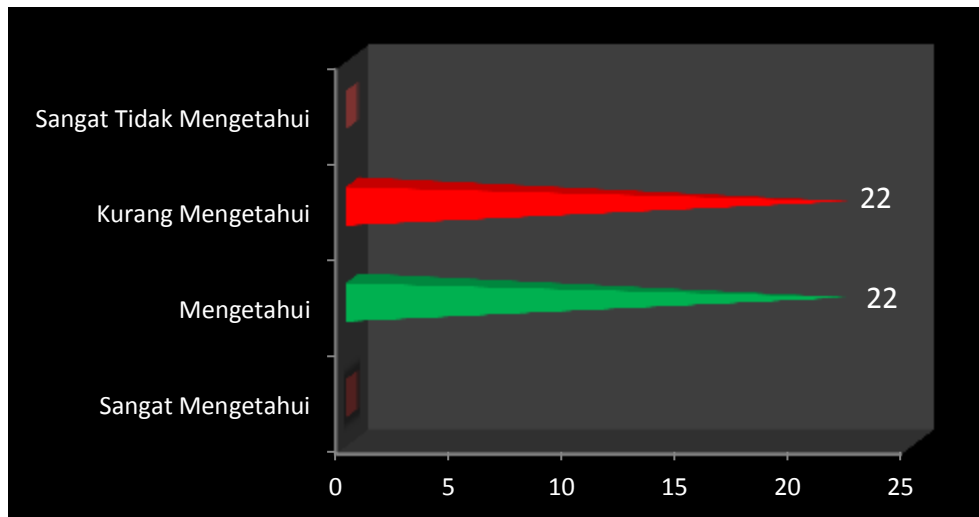
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan dibawah 500,000,- hanya 1 responden (2,3%), pendapatan 750,000 - 1.500,000,- 26 responden (59,1%), dengan banyaknya jumlah responden yang berpenghasilan tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga tersebut berhak mendapatkan Bansos Rastra dilihat dari jumlah responden yang memiliki pendapatan tersebut. Pendapatan 1.750,000-2.500,000,- 17 responden (38,6%). Dan dari seluruh responden tidak ada satupun yang berpenghasilan lebih dari 2.500,000,- perbulannya. Setelah peneliti melakukan perhitungan dari hasil 44 orang responden, ternyata rata-rata pendapatan mereka hanya 750.000 dalam satu bulan.

Dengan demikian 44 responden tersebut memang berhak untuk mendapatkan Bansos Rastra.

4. Distribusi Berdasarkan Persepsi Responden Mengenai Program Bansos Rastra

Bansos Rastra merupakan program pemerintah pusat yang bersifat nasional dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Berikut hasil kuesioner yang diberikan peneliti kepada 44 orang responden :

Gambar 4.8



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar yang disajikan, dapat dilihat tidak ada responden yang sangat mengetahui akan program Bansos ini, sebanyak 22 responden (50%) hanya sebatas mengetahui tentang program Bansos Rastra, mereka mengatakan bahwa program beras ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat melalui pemberian bantuan sosial berupa beras dimana dengan adanya program ini sangat membantu dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga dan dapat sekaligus sebagai mekanisme

perlindungan dan penanggulangan kemiskinan. Hal lain juga diungkapkan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa beliau mengetahui program rastra adalah program pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa beras yang dulunya bersubsidi menjadi bantuan sosial, jadi beras yang diterima masyarakat miskin sebanyak 10Kg/KK tidak lagi dipungut biaya (Gratis) 22 responden juga kurang mengetahui akan program beras tersebut, mereka mengatakan hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak penyalur Bansos. Pihak penyalur Bansos pernah melakukan sosialisasi tetapi sekarang sudah jarang, hal itu mungkin karena masih banyak program baru yang belum diketahui masyarakat banyak. Dan tidak ada responden yang sangat tidak mengetahui akan program beras tersebut.

5. Distribusi Mengenai Informasi Tentang Program Bansos Rastra

Dari 44 responden yang dijumpai oleh peneliti, mereka menyatakan bahwa informasi mengenai adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah bagi keluarga miskin mereka terima dari televisi dan pihak desa. Berikut data dari 44 responden :

Gambar 4.9



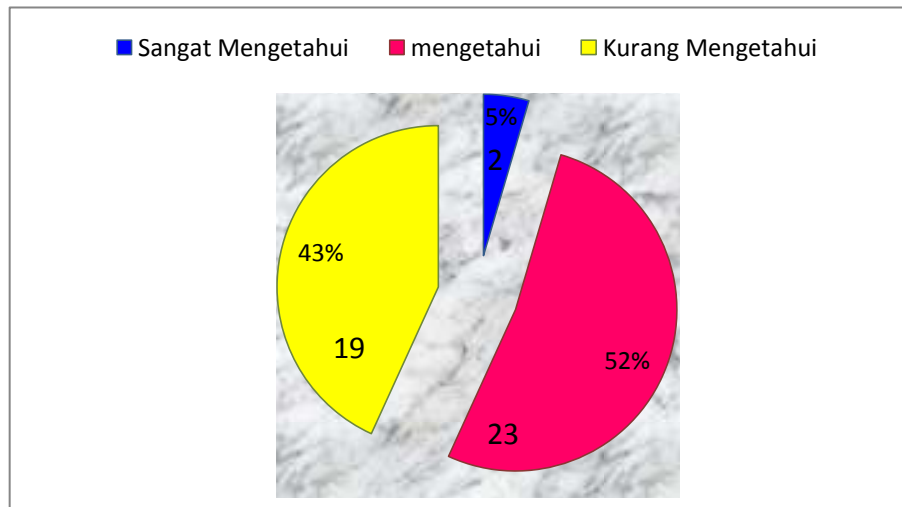
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Gambar diatas menunjukkan dari 44 responden tidak ada satupun yang mengetahui informasi dari radio maupun surat kabar. Mereka mendapatkan informasi dari televisi sebanyak 18 responden (40,9%), salah satu responden mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya program ini melalui televisi dan kemudian beliau datang kepihak desa untuk memastikan apakah program tersebut memang ada dan ternyata beliau adalah salah satu penerima bantuan tersebut, beliau juga menambahkan sosialisasi yang lemah tentu saja berpengaruh kepada kurangnya transparansi program ke masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang kurang paham bahkan tidak paham mengenai program yang dilaksanakan. Dan 26 responden (59,1%) lainnya mendapatkan informasi melalui pihak desa. Salah seorang mengatakan bahwa beliau mendapatkan informasi melalui pihak desa yang datang ke rumahnya. Dan ada juga yang datang langsung ke kantor desa untuk mencari informasi mengenai bantuan sosial tersebut, dari sanalah para penerima Bansos Rastra mengetahui tentang program tersebut.

6. Distribusi Mengenai Manfaat Program Bansos Rastra

Ada beberapa manfaat dari adanya program Bansos Rastra ini salah satunya yakni peningkatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Berikut 44 orang responden menyatakan pendapat mereka mengenai manfaat dari program Bansos Rastra yang telah diuraikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.10



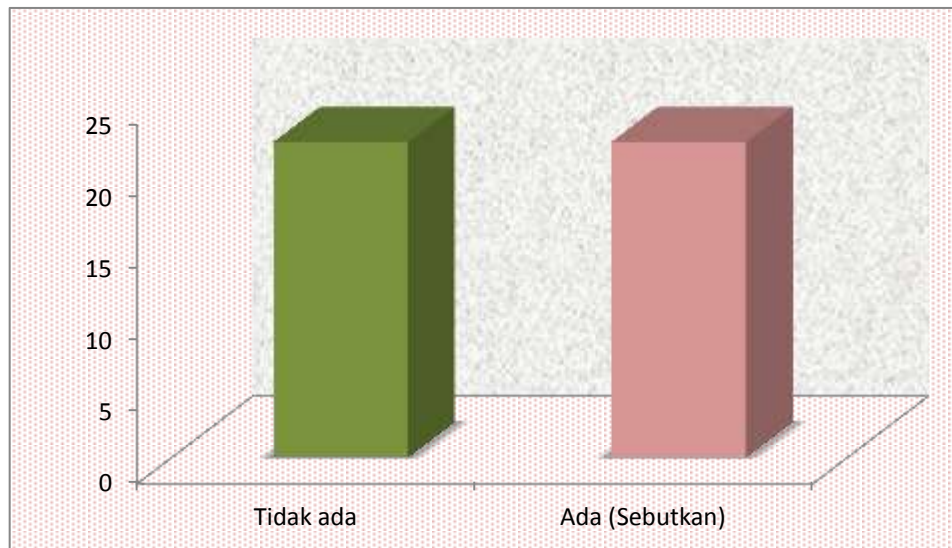
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa hanya 2 responden (4,5%) yang sangat mengetahui apa saja manfaat dari program tersebut. 23 responden (52,3%) lainnya hanya sekedar mengetahui manfaat umum dari program tersebut. Mereka mengetahui manfaat program ini untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan dapat menanggulangi kemiskinan. Dan 19 responden (43,2%) kurang mengetahui manfaat dari program ini, mereka hanya tahu bahwa program ini bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka. Adapun manfaat dari program ini yakni, 1. Adanya peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan mekanisme perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan, 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD/TB), maupun ekonomi (disalurkan tanpa dikenakan harga/biaya tebus) kepada KPM, 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi. 4. Stabilitas harga beras di pasaran, 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional, dan 6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

7. Distribusi Mengenai Bantuan Lain Selain Rastra

Program-program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra / Bantuan Pangan Non Tunai. Berikut data dari 44 responden yang mendapatkan Bantuan lain selain Rastra.

Gambar 4.11



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

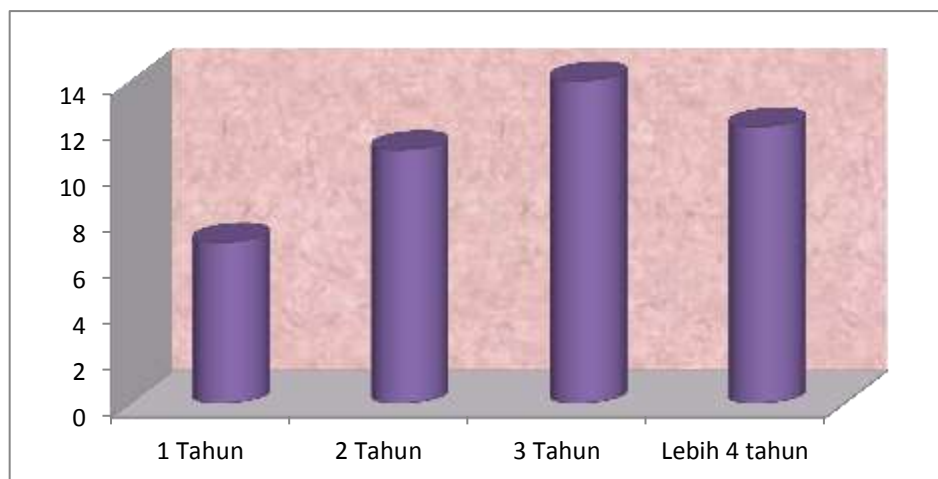
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa dari 44 penerima bantuan tersebut setengah atau 22 responden (50%) mendapatkan bantuan lain yakni PKH. PKH merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018, adapun nilai bansos yang diterima KPM adalah 1.890.000,-/tahun/KPM. Dimana ada juga responden yang mendapatkan (JKN-KIS). Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera.

Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018, pada Tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia. Dan KIP merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat baik formal maupun non formal bagi keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pasantren, dan lain-lain. Dan 22 responden lagi tidak ada mendapatkan bantuan lain selain Bansos Rastra.

8. Distribusi Mengenai Berapa Lama Mendapatkan Bansos Rastra

Dari data dibawah ini kita dapat mengetahui berapa lama 44 orang responden yang mendapatkan Bansos Rastra :

Gambar 4.12



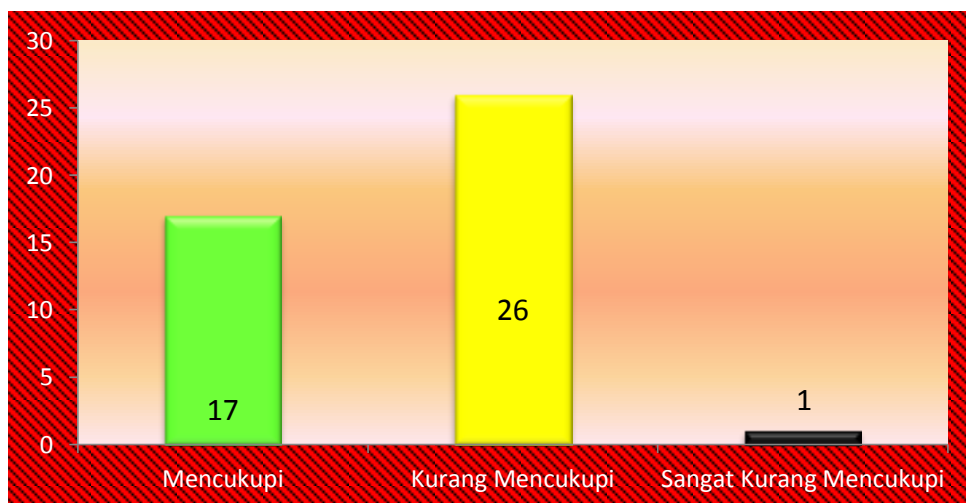
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat 7 responden (15,9%) baru dalam satu tahun belakangan mendapatkan bantuan ini, salah satu responden mengatakan bahwa beliau mendapatkan bantuan ini merupakan usulan dari pihak desa mengingat keadaan yang dialami responden, disini dapat kita lihat bahwa data penerima bansos ini belum akurat, sehingga masih banyak masyarakat yang memang layak menerima bantuan ini tetapi tidak terdaftar dalam data penerima Bantuan Sosial, sedangkan 11 responden (25%) mendapatkan bantuan ini selama 2 tahun, 14 responden lainnya (31,8) sudah 3 tahun belakangan ini mendapatkan Bansos Rastra, dan yang lebih dari 4 tahun mendapatkan Bansos Rastra sebanyak 12 responden (27,3%).

9. Distribusi Mengenai Jumlah Beras 10 Kg/Bulan

Bantuan Sosial Rastra merupakan Program dari pemerintah berupa beras yang setiap bulannya hanya 10Kg/KK. Berikut ini pendapat dari 44 responden mengenai beras yang hanya 10Kg/bulan :

Gambar 4.13



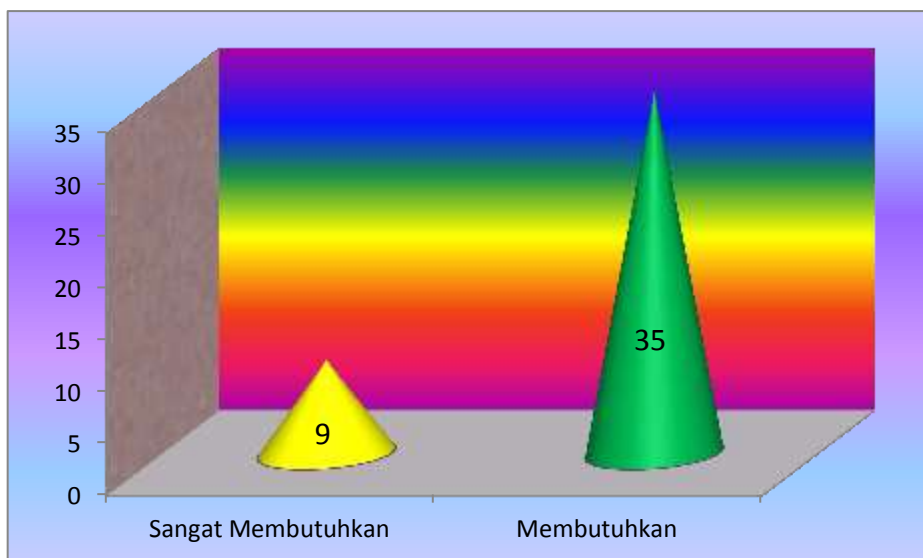
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa 17 responden (38,6%) menyatakan beras yang diberikan 10kg/bulan dapat mencukupi kebutuhannya,hal ini dikarenakan jumlah anggota keluarga tersebut hanya berkisar 2 sampai 4 orang saja, sedangkan yang menyatakan beras 10kg/bulan kurang mencukupi sebanyak 26 responden (59,1%) hal ini karena keluarga tersebut memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sekitar 5 sampai 7 orang, sedangkan 1 orang responden menyatakan bahwa beras 10kg/bulan tersebut sangat kurang mencukupi untuk keluarganya.

10. Distribusi Mengenai Bansos Rastra Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan

Salah satu program bantuan sosial yang diberikan pemerintah yakni Bansos Rastra, dimana bantuan ini berupa beras yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Adapun tanggapan dari 44 rasponden yakni :

Gambar 4.14



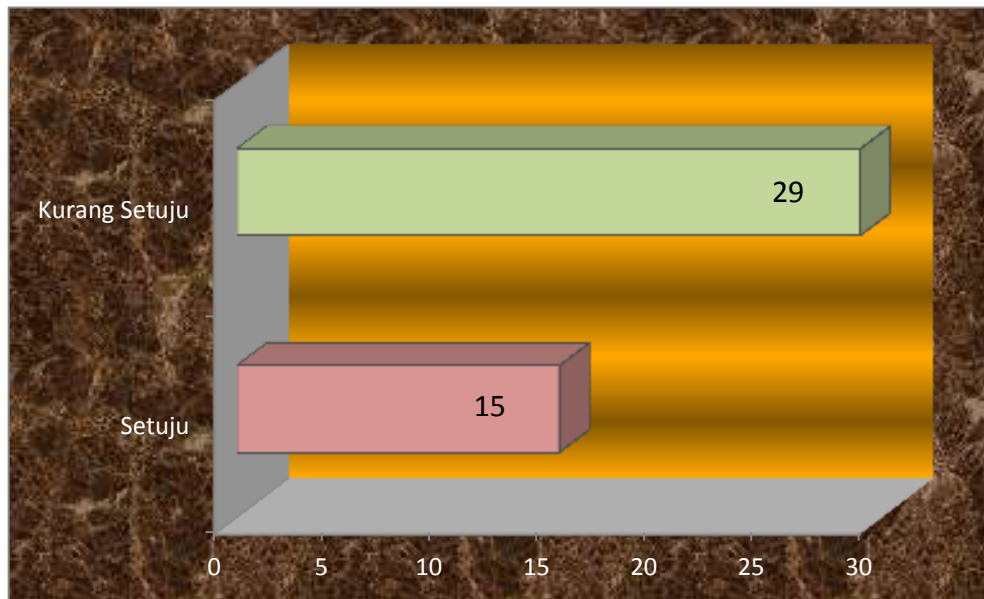
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari gambar diatas 9 responden (20,5%) menyatakan bahwa mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, hal ini karena rendahnya pendapatan keluarga dan mahalnya akan kebutuhan pangan. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya karena beras yang diberikan juga kualitasnya sudah medium, dalam arti kata sudah bagus , baik dan layak untuk dikonsumsi. Salah satu responden menambahkan bahwa program ini memang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam bentuk beras, hanya saja beliau menambahkan bahwa beras yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dalam satu bulan. Sedangkan 35 responden (79,5%) menyatakan bahwa mereka memang membutuhkan Bansos Rastra ini untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dengan begitu ketahanan pangan keluarga mereka dapat meningkat, sehingga dana yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya

11. Distribusi Mengenai Tanggapan Tentang Pembagian Beras 10kg/Bulan

Bansos Rastra adalah bantuan sosial berupa beras yang diberikaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya 10Kg/bulan. Berikut pernyataan 44 Responden mengenai pembagian tersebut :

Gambar 4.15



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa 15 responden (34,1%) menyatakan mereka setuju dengan jumlah beras yang 10kg/bulan,karena hal itu telah ditetapkan oleh pemerintah, karena kebutuhan pangan mereka terpenuhi, sedangkan untuk 29 responden (65,9%), mereka menyatakan kurang setuju dengan ketetapan tersebut. Mereka menginginkan adanya tambahan jumlah beras dari pemerintah, sebab salah seorang responden mengatakan bahwa beras yang hanya 10Kg/ bulan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan mereka, apalagi bagi yang memiliki anggota keluarga serta tanggungan tambahan dalam satu keluarga.

12. Distribusi Mengenai Pengganti Beras Dengan Sembako

Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan pemerintah sebial Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan /atau telur melalui e-warong. Berikut pernyataan dari 44 orang respoden yang peneliti jumpai di Kecamatan Tanjung Pura :

Gambar 4.16



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar yang telah disajikan diatas, 44 responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengganti beras tersebut dengan sembako lain,hal ini karena sudah ketetapan dari pihak penyalur bantuan daerah tersebut. Mereka juga tidak mengetahui bahwa didaerah / di kota lain seperti di kota Medan beras tersebut dapat diganti dengan sembako lain. Mereka juga menyayangkan kebijakan dari pihak penyalur yang hanya membatasi pertukaran uang tersebut hanya dalam bentuk beras, padahal dari 44 responden menginginkan uang tersebut dapat ditukarkan dalam bentuk sembako lain misalnya minyak, telur atau sembako lainnya.

13. Distribusi Mengenai Titik Bagi Bansos Rastra

Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Bansos Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat. 44 orang responden yang ada di Kecamatan Tanjung Pura memberikan tanggapan tentang hal ini seperti data yang telah disajikan di bawah ini :

Gambar 4.17



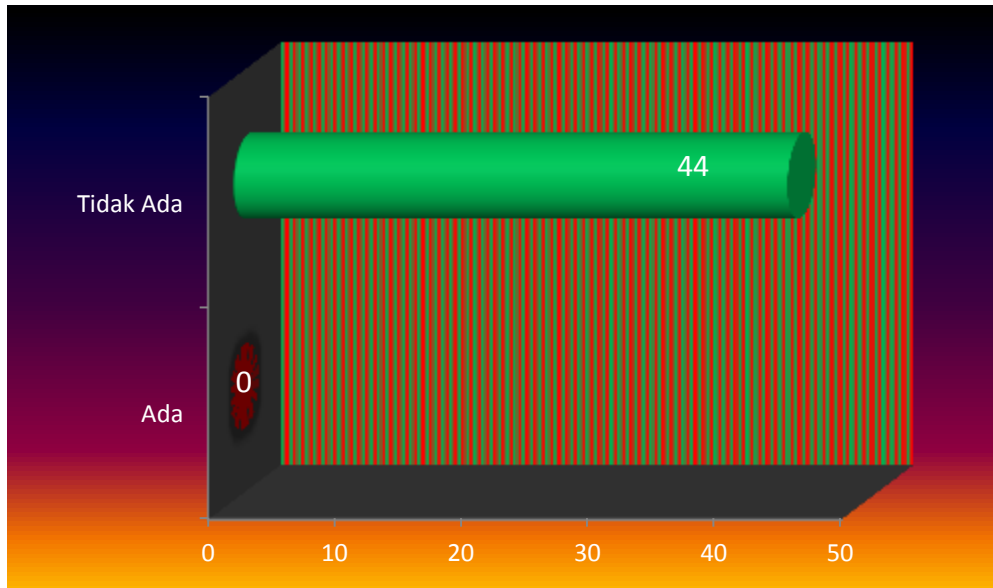
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas, 22 responden (50%) mengatakan mereka setuju dengan titik bagi yang telah ditetapkan, karena mereka mengatakan bahwa dekat dari rumah mereka dan tidak perlu menggunakan kendaraan untuk sampai kesana, otomatis tidak ada pengeluaran yang dilakukan dalam pengambilan bantuan sosial tersebut. Sedangkan 22 responden (50%) lainnya menyatakan kurang setuju dengan hal tersebut, Karena mereka menggunakan kendaraan untuk sampai ke tempat titik bagi beras tersebut, dengan demikian otomatis mereka akan mengeluarkan biaya tambahan dalam pengambilan bantuan sosial tersebut walau dalam jumlah yang kecil.

14. Distribusi Mengenai Biaya Tambahan Dalam Pengambilan Beras

Dari 44 orang responden menyatakan pendapatnya mengenai biaya tambahan dalam pengambilan Bansos Rastra di bawah ini :

Gambar 4. 18



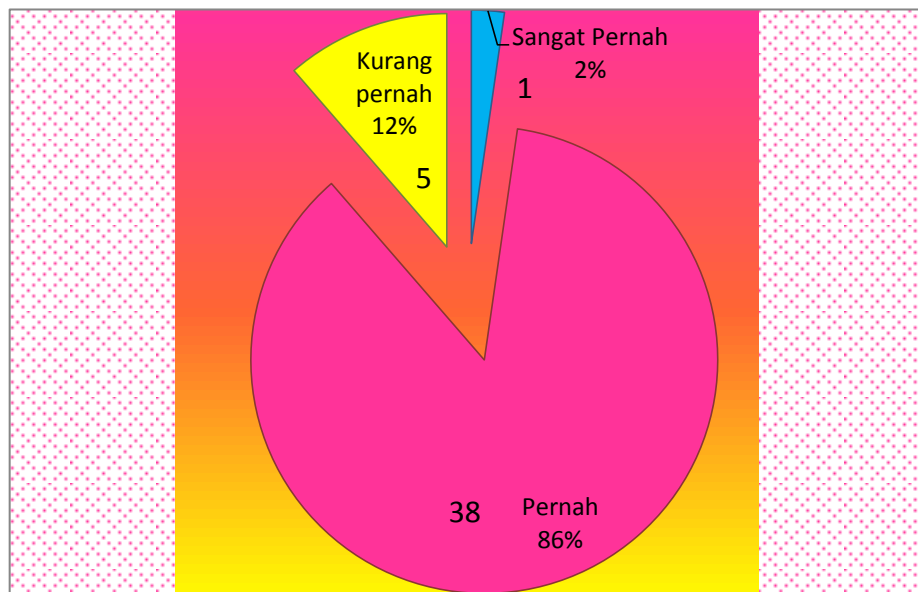
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari Gambar diatas, dapat dilihat seluruh responden yang berjumlah 44 orang menyatakan bahwa mereka tidak pernah dikenakan atau dibebankan biaya tambahan dalam pengambilan beras tersebut, karena memang sudah disebutkan dalam program Bansos Rastra bahwa tidak ada biaya atau harga dalam pengambilan serta tidak ada biaya tambahan apapun. Dengan demikian mereka merasa senang dengan hal itu.

15. Distribusi Mengenai Kendala Dalam Pengambilan Bansos Rastra

Dalam hal ini kendala yang dimaksud adalah pendistribusian yang terhambat. Berikut ini pendapat 44 orang responden terhadap hal tersebut :

Gambar 4.19



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

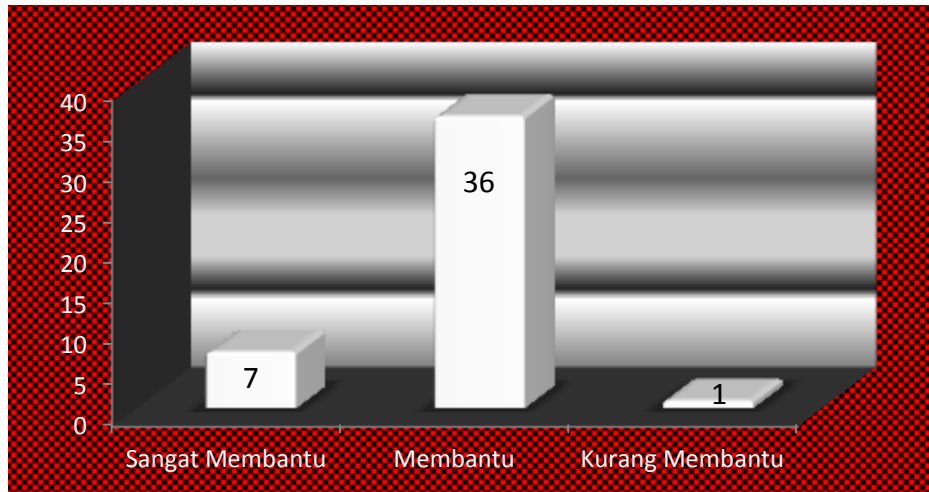
Dari gambar yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa 1 responden mengatakan bahwa beliau sangat pernah mengalami kendala dalam pengambilan beras tersebut, sedangkan 38 responden (86,4%) mengatakan mereka pernah mengalami kendala yakni terlambatnya pencairan beras yang menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian beras di tempat lain (warung-warung terdekat) ada juga mengatakan dengan terlambatnya pencairan beras tersebut mereka berhutang di warung-warung sekitar rumah mereka untuk memenuhi kebutuhan beras. Hal inilah yang menjadi kendala bagi para penerima Bansos Rastra.

16. Distribusi Mengenai Bansos Rastra Yang Dapat Mengurangi Beban Kebutuhan Pangan (Beras)

Beras merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Dengan Adanya Bansos Rastra ini diharapkan bagi Keluarga Penerima Manfaat

dapat terbantu dalam memenuhi beban kebutuhan pangan (beras). Pernyataan yang disampaikan oleh 44 responden dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4. 20

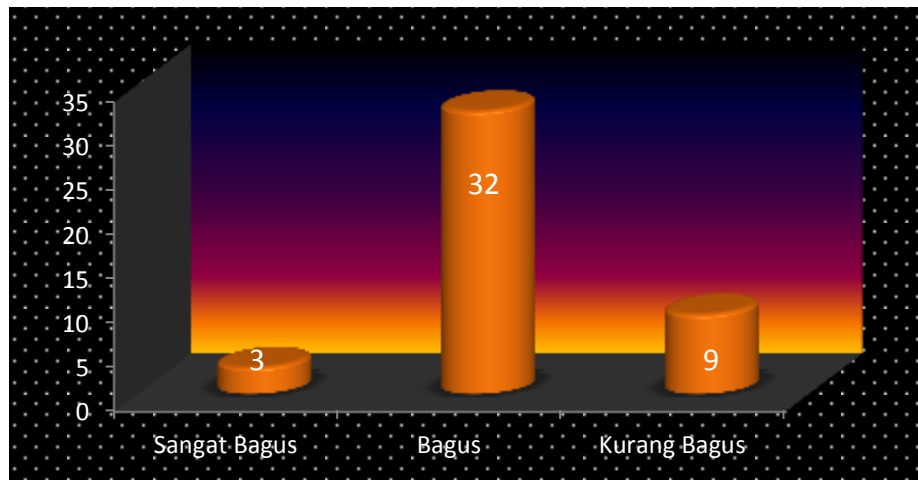


Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Bansos Rastra ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pangan. Hal itu dapat dilihat dari 7 orang (15,9%) menyatakan kebutuhan pangan mereka terpenuhi, karena Bansos ini sangat bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pangan keluarga, mereka juga mengatakan dengan adanya program ini masyarakat menjadi terbantu karena mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk membeli beras, karena beras yang mereka terima baik dan layak untuk dikonsumsi. Sebanyak 36 (81,8%) menyatakan bahwa Rastra membantu mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan mereka. Sedangkan 1 orang responden mengatakan bahwa Rastra kurang membantu kebutuhan pangannya dikarenakan mereka memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak.

17. Distribusi Responden Mengenai Kualitas Beras

Gambar 4. 21



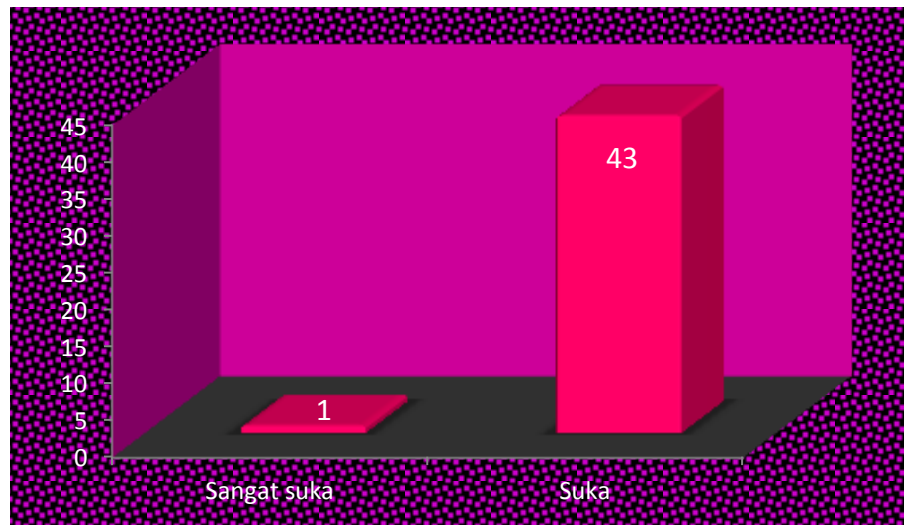
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dari gambar diatas dapat dilihat sebanyak 3 responden (6,8%) menyatakan bahwa kualitas beras yang mereka terima dalam keadaan yang sangat bagus, mereka juga menambahkan bahwa beras tersebut tidak kalah bagus dengan beras yang dijual di pasaran. 32 responden (72,7%) lainnya kualitas beras yang mereka terima sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah menyatakan bahwa yakni kualitas medium. Sedangkan 9 responden (20,5%) ada juga yang mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan beras yang kualitasnya rendah seperti warnanya keruh, pecah pecah, dan berantah mereka menerima beras yang kurang bagus dalam beberapa bulan belakangan ini.

18. Distribusi Tanggapan Mengenai Bansos Rastra

Tanggapan 44 orang responden mengenai adanya Bansos Rastra yang diberikan oleh pemerintah :

Gambar 4.22



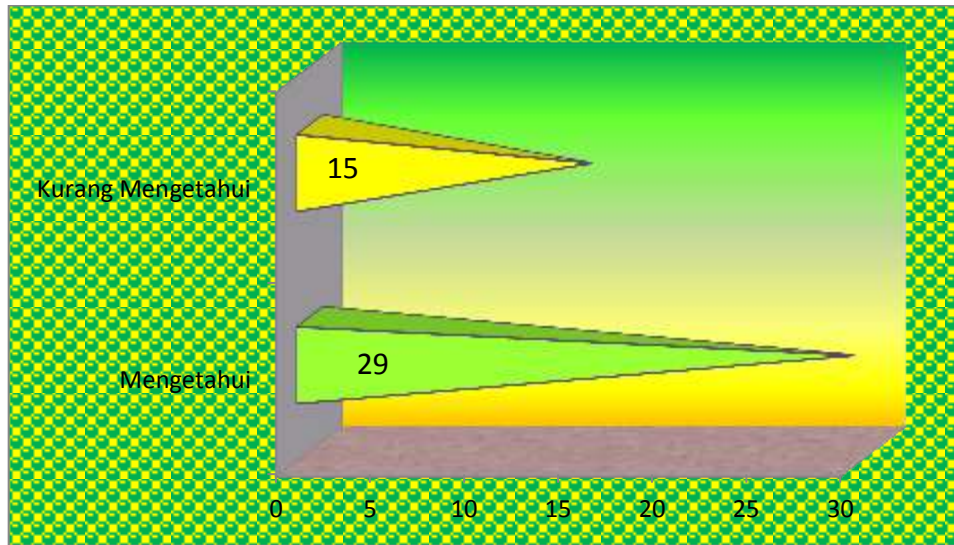
Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Berdasarkan gambar diatas 1 orang responden menyatakan bahwa sangat suka dengan program Bansos yang diberikan oleh pemerintah. Dan 43 responden (97,7%) menyatakan mereka suka /setuju dengan adanya Rastra, mereka merasa terbantu dengan adanya program ini dimana tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, salah seorang responden juga menambahkan bahwa uang yang tadinya disisihkan untuk membeli beras sekarang bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Tetapi salah satu dari responden menyatakan pendapatnya bahwa pemerintah lebih baik mengganti Rastra dengan program lain yang tidak hanya memberi bantuan beras saja namun program yang lebih berpengaruh pada kehidupan responden kedepannya.

19. Distribusi Mengenai Tujuan Bansos Rastra

Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan bantuan berupa beras adalah tujuan dari Bansos Rastra. 44 responden menyatakan pendapatnya mengenai hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4. 23



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Dilihat dari gambar diatas sebanyak 29 responden (65,9%) mengetahui tujuan dari program Bansos Rastra itu sendiri. Dan sebanyak 15 responden (34,1%) kurang mengetahui akan tujuan dari Program Bansos Rastra tersebut. Adapun tujuan dari program Bansos Rastra yakni mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui bantuan sosial berupa beras berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah 10kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/ biaya tebus.

Berdasarkan analisis data yang telah uraikan sebelumnya, bahwa dengan adanya program bansos rastra tersebut dapat membantu dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat dilihat dari hasil responden Sebanyak 36 orang (81,8%) yang mengaku terbantu dengan adanya program ini. Tujuan dari program bansos rastra itu sendiri adalah yakni mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui bantuan sosial berupa beras

berkualitas medium kepada KPM dengan jumlah 10kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/ biaya tebus.

Ternyata banyaknya jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi ketahanan pangan keluarga, karena dengan jumlah beras yang hanya 10kg/bulan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan keluarga dengan jumlah yang banyak.

Terkendalanya pendistribusian rastra ternyata menimbulkan masalah. Karena para keluarga penerima manfaat akan mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kebutuhan pangan keluarganya. Dengan demikian mereka berharap agar tidak ada kendala dalam pendistribusian rastra yang akan berdampak pada ketahanan pangan keluarga penerima manfaat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang terdapat di bab ini adalah merupakan hasil yang dicapai dari analisis data dalam penelitian tentang Efektivitas Program Pelaksanaan Bansos Rastra Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa efektivitas program bansos rastra untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yaitu :

1. Adanya Program Bansos Rastra dapat membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dan meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga.
2. Jumlah anggota keluarga yang banyak ternyata berdampak pada ketahanan pangan Keluarga Penerima Manfaat.
3. Adanya keterlambatan dalam pendistribusian Bansos Rastra berakibat pada Ketahanan Pangan Keluarga Penerima Manfaat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah agar tetap mengadakan program bansos rastra karena program tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

terutama dalam hal pangan serta membantu mengurangi beban pengeluaran.

2. Kepada pemerintah desa serta perum BULOG untuk lebih memperbaiki kualitas beras.
3. Dalam pelaksanaan program bansos rastra masyarakat yang menjadi sasaran utama program ini, maka dari itu sosialisasi kepada masyarakat lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti akan konsep bansos tersebut. Begitupun dengan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaku pendistribusian Rastra untuk keluarga penerima manfaat tersebut.
4. Diharapkan dalam setiap kegiatannya terdapat control atau pengawasan oleh pemerintah setempat , baik dimulai dari penetapan rumah tangga penerima manfaat Rastra hingga pada pelaksanaan pembagian beras sampai kepada keluarga penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Firman B., 1990, *Perencanaan dan Evaluasi (PDE)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Annas, Aswar. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar., 2010, *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (tahun 2017). Jumlah Penduduk Miskin. 17 Desember 2018. <https://bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (11 September 2017). Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. 17 Desember 2018. <https://sumut.bps.go.id/>
- Khosman, Ali et al. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pedoman Umum Bansos Rastra dan Sosialiasi Bansos Rastra (2018)
- Siagian, Matias. (2012). *Kemiskinan dan Solusi*. Medan: PT Grasindo Monoratama.
- Sjafari, Agus. (2014). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono., 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono., 2012, *Memahami Penulisan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Tangkalisan & Nogi, Hesel. (2005). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 18 dan 58.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : **Nurmauliza**
NPM : 1505180054
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 23 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara

II DATA ORANG TUA

Nama Ayah : **Syamsul Bahri**
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Bakung, 31 Desember 1962
Pekerjaan : Buruh (Tukang)
Agama : Islam
Alamat : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung

Nama Ibu : **Habibah**
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Bakung, 10 September 1966
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung

III PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri 050728 Tanjung Pura tamat pada Tahun 2008
2. Mts Negeri 1 Tanjung Pura tamat pada Tahun 2011
3. MA Negeri 2 Tanjung Pura Tahun 2014
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai Mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 778 / TGS / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
setujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tanggal : 06 Desember 2018

ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

1a : NURMALIZA
M : 1505180054
ester : VII (Tujuh)
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
il Proposal / Skripsi : Evaluasi Program pelaksanaan Beras Miskin (Raskin) Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Pangan Pada Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
a Pembimbing : Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,M.Si.


demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 06 Desember 2019
Revisi Judul.....

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Rabiul Awwal 1440 H
06 Desember 2018 M



Dekan 



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini NURMAULIZA tanggal Senin, 28 Januari 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan NURMAULIZA menerangkan bahwa :

N a m a : NURMAULIZA
N .P.M. : 1505180054
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Pura ,23 November 1995
Alamat Rumah : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung
JudulProposal :EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	efektifitas Prognis Pelaksanaan Bansos Rashtra thd
Bab I	Kelangkaan Pangan & Kecamatan Tanjung Pura kab. Lpkat
Bab II	→ Bab kel. masukkan ke bab <u>IV</u>
Bab III	→ + Refleksi Rencanab, +
Lainnya	
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Senin, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, SE., M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA, M.Si.



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Senin, 28 Januari 2019* menerangkan bahwa:

Nama : NURMAULIZA
N.P.M. : 1505180054
Tempat / Tgl.Lahir : Tanjung Pura ,23 November 1995
Alamat Rumah : Dusun Anggrek Desa Teluk Bakung
JudulProposal :EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,SE.,M.Si.*

Medan,Senin, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,SE.,M.Si.

Pembanding

Dra.Hj.LAILAN SAFINA,M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 65/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 22/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurmauliza
NPM : 1505180054
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : -

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : -

Rencana Judul : 1. Evaluasi program pelaksanaan beras miskin (Raskin) dan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan pada Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
2. -
3. -

Objek/Lokasi Penelitian : -

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Nurmauliza)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 65/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/22/11/2018

Nama Mahasiswa : Nurmauliza
 NPM : 1505180054
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Konsentrasi : -
 Tanggal Pengajuan Judul : 22/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor 305 / 12 / EP / 10, atau;
 Alternatif judul lainnya..... (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Nama Dosen pembimbing : RUSWITA HARNI (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 05 Desember 2018.
 Dosen Pembimbing
Dra. Ruswita Hafni, M.Si.

Disahkan oleh:
 Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

 (Dr. Pravidya Hariani RS., SE., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NURMAULIZA
NPM : 1505180054
Konsentrasi : —
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Pajak/Manajemen/Ekonomi
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 21 Januari 2019

Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURMAULIZA
N.P.M : 1505180054
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN BANSOS RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
15/4-2019	- merencanakan flow kuisioner - Lembar dg adehipkasi, def. opini variabel	J	[Signature]
16/5-2019	- Ace kuisioner, langsung di sebar - kompulka data yg berlute di bab IV	J	[Signature]
25/8-2019	- Olah data - Distribusi hasil kuisioner / (tabel) / tabel / variasi dng berbagai alasan, & response - Bab IV → perubahan terwujud. (perbaikan sesuai anket).	J	[Signature]
23/9-2019	- Bab IV ok! + perbaikan tabel jurnal antar hasil kuisioner. - Bab V → kesimpulan & saran di perbaikan	J	[Signature]
24/9-2019	- Mnat Abstrak, Daftar isi, kebbjatar - Daftar pustaka, lampiran? - Perbaikan sesuai anket.	J	[Signature]
27/9-2019	ACE untuk sidang meja baji		[Signature]

Pembimbing Skripsi



Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Medan, 27 September 2019

Diketahui /Disetujui

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Lengkap : NURMAULIZA
 N.P.M : 1505180054
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Judul Skripsi : EVALUASI PROGRAM PELAKSANAAN
 BANSOS RASTRA TERHADAP
 KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN
 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal Skripsi	Paraf	Keterangan
26/11-2017	- Acc Judul - cari data dan jurnal pendukung.		
30/11-2018	Prab I → latar belakang → cari data Identifikasi masalah - Batasan dan rumusan masalah (bertukar dgn skripsi awal lainnya)		
5/12-2018	Prab II - Latar teori & uraian - penelitia sebelumnya → tema judul - kerangka konseptual - Kerangka teori awal, (tiskan)		
18/12-2018	Prab III - Metodologi penelitia → & uraian - Definisi operasional - populasi & sampel - Grafik data		
26/12-2018	- Daftar pustaka dan labikan, spasi & format		
28/12-2018	- Acc Seminar Proposal		

Medan, 28 Desember 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Unggul Cerdas | Terpercaya

**KUISIONER PENELITIAN EFEKTIVITAS PROGRAM PELAKSANAAN
BANSOS RASTRA TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI
KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT**

Dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan Ibu untuk mengisi daftarpertanyaan (angket) yang saya berikan. Data ini diperlukan sebagai tambahaninformasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul: **“Efektivitas Program Pelaksanaan Bansos Rastra Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ”**

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET :

1. Anda diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ada pada angket ini yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan anda, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain.
2. Berikanlah tanda checklist (X) pada kolom yang Anda anggap sesuai dengan jawaban pada Anda.

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : _____
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : 20-30 31-40 41-50 51-70
4. Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA
5. Pekerjaan : _____

B. Pertanyaan

1. Jumlah anggota keluarga Bapak / ibu
 - a. 2 orang
 - b. 2 sampai 4 orang
 - c. 5 sampai 7 orang
 - d. lebih dari 78orang
2. Jumlah anak dalam anggota keluarga Bapak / Ibu
 - a. Tidak ada
 - b. 1 atau 2 orang
 - c. 3 sampai 5 orang
 - d. lebih dari 5 orang
3. Apakah pekerjaan Bapak / Ibu
 - a. Petani
 - b. Nelayan
 - c. Wiraswasta
 - d. Lain- lain (Sebutkan)

4. Pendapatan Bapak / Ibu perbulan

- a. Di bawah Rp 500.000,-
- c. Rp 1.750.000,- sampai Rp 2.500.000,-
- b. Rp 750.000,- sampai Rp 1.500.000,-
- d. lebih dari Rp 2.700.000,-

5. Apakah Bapak / Ibu tahu mengenai program beras untuk keluarga miskin?

- a. Sangat mengetahui
- c. Kurang mengetahui
- b. Mengetahui
- d. Sangat tidak mengetahui

Alasannya : _____

6. Dari mana Bapak / Ibu memperoleh informasi mengenai program bansos rastra?

- a. Radio
- c. Surat kabar
- b. Televisi
- d. Lain- lain (Sebutkan)

7. Apakah Bapak / Ibu mengetahui manfaat program bansos rastra?

- a. Sangat mengetahui
- c. Kurang mengetahui
- b. Mengetahui
- d. Sangat tidak mengetahui

Alasannya : _____

8. Apakah Bapak / Ibu ada mendapatkan bantuan lain selain rastra?

- a. Tidak ada
- b. Ada (Sebutkan)

9. Sudah berapa lama Bapak / Ibu mendapatkan bansos rastra tersebut?

- a. 1 tahun
- c. 3 tahun
- b. 2 tahun
- d. Lebih dari 3 tahun

10. Apakah dengan jumlah 10 kg/bulan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (beras) Bapak / Ibu ?

- a. Sangat mencukupi
- b. Mencukupi
- c. Kurang mencukupi
- d. Sangat kurang mencukupi

Alasannya : _____

11. Apakah Bapak / Ibu membutuhkan bansos rastra ini untuk memenuhi kebutuhan pokok?

- a. Sangat membutuhkan
- b. Membutuhkan
- c. Kurang membutuhkan
- d. Sangat tidak membutuhkan

Alasannya : _____

12. Bagaimana tanggapan Bapak / Ibu tentang bansos rastra yang di salurkan hanya 10 kg/bulan ?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Sangat tidak setuju

Alasannya : _____

13. Apakah Bapak / Ibu pernah mengganti bansos rastra dengan sembako lain?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

Alasannya : _____

14. Apakah Bapak / Ibu setuju dengan tempat pengambilan bansos rastra yang telah disepakati?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Kurang setuju
- d. Sangat tidak setuju

Alasannya :

15. Apakah Bapak / Ibu dikenakan biaya tambahan dalam pengambilan beras ditempat yang sudah disepakati?

- a. Ada
- b. Tidak ada

Alasannya :

16. Apakah Bapak / Ibu dalam pengambilan bansos rastra pernah mengalami kendala?

- a. Sangat pernah
- b. Pernah
- c. Kurang pernah
- d. Sangat tidak pernah

Alasannya :

17. Apakah dengan adanya bantuan bansos rastra ini dapat membantu mengurangi beban Bapak / ibu dalam memenuhi kebutuhan pokok (beras)?

- a. Sangat membantu
- b. Membantu
- c. Kurang membantu
- d. Sangat tidak membantu

Alasannya :

18. Bagaimana kualitas gelas yang Bapak / Ibu terima ?

- a. Sangat bagus
- b. Bagus
- c. Kurang bagus
- d. Sangat tidak bagus

Alasannya :

19. Apa komentar Bapak / Ibu mengenai bansos rastra yang telah diberikan oleh pemerintah?

- a. Sangat suka
- b. Suka
- c. Kurang suka
- d. Sangat tidak suka

Alasannya :

20. Apakah Bapak / ibu tahu tujuan dari adanya bansos rastra ini?

- a. Sangat mengetahui
- b. Mengetahui
- c. Kurang mengetahui
- d. Sangat tidak mengetahui

Alasannya :
